ISSN : 1979-6579

Buletin Ketenagalistrikan

Edisi 39 Volume 10 September 2014

Kementerian ESDM Siap Jalankan Reformasi Birokrasi

MKI Tuan Rumah HLN Ke-69

Pemerintah Harapkan Kajian Ketenagalistrikan dari Perguruan Tinggi

Menteri ESDM Minta Pegawai Bekerja Untuk Kesejahteraan Rakyat

Wamen ESDM hadiri The 32nd AMEM

Pemanfaatan Energi Angin

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Dari Redaksi

Dalam masyarakat ekonomi ASEAN yang akan dimulai tahun 2015 nanti, sub sektor ketenagalistrikan terus berbenah. Jika pasar bebas ASEAN diterapkan, Badan Usaha Sub Sektor Ketenagalistrikan d Indonesia akan bersaing dengan badan usaha ari negara tetangga. Selain itu tenaga ahli dan perusahaan kontraktor listrik dari negara-negara ASEAN bisa masuk ke Indonesia. Untuk mengamankannya pemerintah menyiapkan sistem register di bidang ketenagalistrikan untuk memfilter badan usaha dari negara lain. Nantinya setiap badan usaha di bidang ketenagalistrikan dari negara tetangga yang masuk ke Indonesia selain tersertifikasi, juga harus teregister. Sehingga yang masuk ke Indonesia benar-benar mempunyai kompetensi, baik secara tenaga kerja maupun perusahaan.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral siap melaksanakan pembinaan sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Untuk itu perubahan manajemen internal melalui Reformasi Birokrasi. Meskipun pembayaran tunjangan kinerja baru dilaksanakan pada tahun 2014 ini, Kementerian ESDM telah menghemat berbagai anggaran dan menciptakan perizinan di sektor ESDM dengan lebih baik. Penghematan anggaran tersebut diharapkan dapat digunakan untuk pembangunan sektor ketenagalistrikan.

Buletin Ketenagalistrikan Edisi 39 Volume X tahun 2014 ini memuat berbagai informasi seperti persiapan Hari Listrik Nasional yang jatuh tanggal 27 Oktober mendatang, pelaksanaan The 32nd AMEM di Lao PDR yang dihadiri Wakil Menteri ESDM, serta artikel menarik lainnya seputar pemanfaatan energi angin dan program listrik perdesaan di Provinsi Maluku Utara.

Kami mengucapkan selamat membaca dan kami mohon masukan terkait perkembangan Buletin Ketenagalistrikan ke depan.

SUSUNAN REDAKSI

Penanggung Jawab
Sekretaris Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan

Redaktur
Totoh Abdul Fatah, Heru Setiawan, Hinsa Silaen, Ear Marison, Hagni Surendro, Felix Rudianto, Slamet Riyadi, Sudarti, Wiwid Mulyadi, Jackson Frans, Fathorrahman, Hari Dwi Wijayanto, Pandu Satria Jati, David F Silalahi, Ilham Budi, Elif Doka Marliska, Andi Winarno, Eri Nurcahyanto, Novan Akhiriyanto, Dina Andriani, Hening Surya Bayu A.

Penyunting/ Editor
Ernawati, Suwarno, Matilda Parameswari, Stefanus Wisnu W

Desain Grafis/Fotografer
Achmad Yusuf Haryono Agus Supriyadi, Ajat Munajat, Novi Pravitasari, Adar

Sekretariat
Emi Tursilah, Irman Suryana, Efrika Maritho, Rizka Octiwi, Riono Saputra

DAFTAR ISI

Berita

ARTIKEL

Alamat Redaksi
Sekretariat Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-2 Kav.07-08,
Kuningan, Jakarta 12950
Telepon/Fax (021) 5225180
Email : buletin@djlpe.esdm.go.id

Hadapi AFTA 2015, Pemerintah Siapkan Penomoran Sertifikasi Ketenagalistrikan

Dalam masyarakat ekonomi ASEAN yang akan dimulai tahun 2015 nanti, tenaga ahli dan perusahaan kontraktor listrik dari negara-negara ASEAN bisa masuk ke Indonesia. Untuk mengamankannya pemerintah menyiapkan sistem register di bidang ketenagalistrikan untuk memfilter badan usaha dari negara lain. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Ir Jarman MSc saat meluncurkan 'SLO Goes Online' yang diselenggarakan oleh Konsuil di Sanur, Bali (5/7). Menurutnya, setiap badan usaha di bidang ketenagalistrikan dari negara tetangga yang masuk ke Indonesia selain tersertifikasi, juga harus teregister. "Sehingga yang masuk ke Indonesia benar-benar mempunyai kompetensi, baik secara tenaga kerja maupun perusahaan," ujar Jarman.

SLO Goes Online yang diluncurkan pertama kali di provinsi Bali ini menurut Jarman diharapkan dapat dipadukan dengan sistem database sistem register yang disiapkan oleh pemerintah. Menurut Jarman, untuk memberikan rasa aman bagi konsumen listrik, pemerintah bertugas melakukan sistem kontrol dengan e-register. Namun menurutnya, sistem kontrol ini jangan sampai membuat waktu pelayanan menjadi lama. Jarman mengapresiasi e konsuil dan Gerai Daya yang disiapkan oleh Konsuil bersama PT PLN. Menurutnya sistem gerai daya

dimana pengurusan Sertifikat Laik Operasi (SLO) bisa berjalan online dan diselesaikan maksimal tiga hari sehingga memberikan keamanan dan kenyamanan bagi konsumen listrik.

Menurut Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2014 tentang Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan, PLN tidak dapat memasang instalasi listrik jika belum terbit SLO. Di lain pihak, SLO diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan. Sistem kontrol yang disiapkan pemerintah melalui e register diharapkan dapat diintegrasikan oleh badan usaha penyediaan maupun penunjang ketenagalistrikan. “Pemerintah selaku regulator menyiapkan kebijakan dan pelayanan terbaik, namun akhirnya yang akan bersaing adalah stake holder yang ada di lapangan,” ujar Dirjen memberikan motivasi kepada peserta. Jarman mengingatkan kepada para pelaku usaha jasa penyediaan maupun jasa penunjang untuk memberikan pelayanan kepada konsumen. Menurutnya persaingan bukan hanya dengan para pelaku usaha dalam negeri, namun juga pelaku usaha luar negeri. Bagi yang sudah mendapatkan izin, Ia menegaskan bahwa para pelaku usaha dalam negeri tidak perlu mendaftar lagi, cukup dengan penomoran yang disiapkan oleh pemerintah. Ia juga berharap e-konsuil yang terintegrasi dengan sistem gerai daya PT PLN dapat segera direalisasi per 1 Januari 2015. (PSJ)

Kementerian ESDM Siap Jalankan Reformasi Birokrasi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan siap melaksanakan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang lebih baik. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri ESDM Susilo Siswo Utomo dalam acara Internalisasi Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM yang diselenggarakan di Gedung Setjjen KESDM, Jumat (11/10). Menurut Wamen, pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian ESDM harus punya roadmap. “Jangan sampai roadmap RB KESDM salah arah,” ujar Wamen ESDM. Untuk itu Kementerian ESDM mengundang Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo untuk memberikan pengarahan kepada Kementerian ESDM.

Acara yang mengangkat tema ‘Dengan Reformasi Birokrasi Kita Tingkatkan Kinerja dan Good Governance di Lingkungan Kementerian ESDM’ ini dihadiri oleh para pejabat dan panitia Reformasi Birokrasi di Kementerian ESDM. Hadir pula dalam acara tersebut Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jarman, Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, serta para Direktur dan Para Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan.

Wamen ESDM sebelum membuka acara menyampaikan bahwa sejak tahun 2013 Kementerian ESDM telah melaksanakan Reformasi Birokrasi secara resmi, meskipun pembayaran tunjangan kinerja baru dilaksanakan pada tahun 2014 ini. Ia juga menyatakan bahwa Kementerian ESDM telah menghemat berbagai anggaran dan menciptakan perizinan di sektor ESDM dengan lebih baik. Untuk itu BPKP diundang untuk memberikan evaluasi terhadap perizinan-perizinan yang telah dilaksankan oleh Kementerian ESDM.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PAN-RB menyampaikan sasaran Reformasi Birokrasi salah satunya adalah untuk memperbaiki pelayanan publik. Menurutnya pekerjaan rumah Kementerian ESDM adalah mempercepat perizinan. Menteri PAN-RB juga menceritakan bagaimana dia dan Kementerian PAN-RB menata jumlah dan distribusi PNS. Untuk itu ia memberikan gambaran bahwa ke depan pendaftaran penerimaan CPNS akan dilaksanakan secara online, serta mempermudah syarat-syarat administrasinya. “SKCK dan syarat-sayarat lainnya (diminta) setelah diterima,” ujarnya.

Kepala BPKP Mardiasmo melanjutkan dengan arahan-arahan pada Kementerian ESDM untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada publik untuk menuju reformasi birokrasi. Ia memuji Kementerian ESDM yang sejak tahun 2013 telah mengerem pengeluaran untuk perjalanan dinas. Ke depan, Wamen ESDM berharap reformasi birokrasi yang telah dimulai dan dilaksanakan di Kementerian ESDM ini dapat terus dilaksanakan dengan pemberia reward and punishment secara proposional.

Pemerintah Terus Tingkatkan Pembangunan Ketenagalistrikan

Pemerintah terus menyiapkan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan pembangunan di sektor ketenagalistrikan. Keberhasilan pembangunan di sektor ketenagalistrikan tidak terlepas dari pengatur kebijakan tersebut. Menurut Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ir Jarman MSc, empat tahun terakhir telah dilakukan perubahan-perubahan di bidang ketenagalistrikan. Perubahan-perubahan tersebut antara lain adalah pemberian margin kepada PLN sekitar 8% serta program FTP I yang dilakukan pemerintah untuk memacu PT PLN membangun pembangkit-pembangkit baru. Menurut Jarman, saat ini APBN untuk pembangunan ketenagalistrikan dialokasikan sebesar 9 Triliun. “Hasilnya terlihat bahwa dari tahun 2010 kapasitas pembangkit kita naik 15 GW dalam waktu 4 tahun,” ujar Jarman. “Rasio elektrifikasi naik dari 67% menjadi 80,5%,” tambahnya. Konsumsi listrik nasional menjadi 917 Kwh/ kapita di akhir tahun 2013 di mana akhir tahun 2010 baru mencapai 640 kwh/kapita.

Hal tersebut disampaikan Dirjen Ketenagalistrikan dalam Diskusi Panel dan Buka Puasa Bersama yang diselenggarakan Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) pada Kamis (17/4) di gedung Indonesia Power, Jakarta. Diskusi panel yang mengangkat tema ‘Economic Outlook dan tantangan sektor ketenagalistrikan 5 tahun ke depan’ ini mengundang seluruh unsur masyarakat ketenagalistrikan serta menghadirkan beberapa panelis diantaranya Direktur

Jenderal Ketenagalistrikan jarman, anggota Dewan Energi Nasional Prof Dr Tumiran, serta pengamat ekonomi Radja Pande Silalahi. Dirjen Ketenagalistrikan sendiri menyampaikan kebijakan tantangan-tantangan sektor ketenagalistrikan dalam lima tahun ke depan.

Menurut Jarman yang perlu diwaspadai dari pemberian margin kepada PLN adalah kondisi keuangan PLN sendiri. Selain itu dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terlihat adanya pertumbuhan kebutuhan kapasitas listrik 6-7 GW pertahun. Dari RUPTL tersebut di 2018 terlihat adanya permintaan listrik tidak dapat dipasok. Beberapa kendala yang ia paparkan diantaranya adalah adanya berbagai program pembangunan yang tidak tepat waktu, seperti di Sumatera Selatan.

Dirjen juga menyampaikan bahwa keberlanjutan program ketenagalistrikan dapat berjalan baik jika ada pricing policy yang benar. Menurut Jarman, mulai tahun ini semua golongan konsumen listrik kecuali 450VA, 900VA, sosial, serta UKM tidak lagi disubsidi. Dengan adanya hal tersebut, diharapkan dapat memperbaiki struktur keuangan PLN. Kebijakan pengapusan subsidi listrik untuk industri akan mendorong pelaku industri tertarik untuk membangun pembangkit sendiri karena lebih murah. Pemerintah menurut Jarman tengah menyiapkan kebijakan Power Wheeling dimana pembangunan pembangkit listrik untuk kawasan industri dapat dilakukan di luar kawasan industri.

Di tahun 2020 nanti pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi sebesar 99% dan konsumsi listrik sebesar 1.550 Kwh/kapita. Untuk keluar dari medium trap country, menurut Jarman diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan listrik yang kapasitasnya besar. Berbagai kebijakan mengenai tarif listrik yang diungkapkan Jarman dalam kesempatan tersebut adalah penyederhanaan tarif listrik dan tarif progresif untuk pelanggan 450 MW dan 900 MW. Pemerintah akan mendorong pembangunan pembangkit batubara hingga 60% sebab selain murah dan cepat, Indonesia punya sumber daya pembangkit batubara yang baik. Namun ia mengingatkan agar pembangkit listrik berbahan bakar batubara menggunakan teknologi yang harus ramah lingkungan.

MKI Tuan Rumah HLN Ke-69

Tahun ini, peringatan Hari Listrik Nasional (HLN) akan diselenggarakan oleh seluruh komponen masyarakat ketenagalistrikan. HLN yang dipusatkan di Jakarta ini diselenggarakan oleh Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI). Penunjukan MKI untuk menyelenggarakan peringatan HLN ke-69 ini bertujuan agar peringatan hari listrik tidak hanya diperingati oleh pemerintah dan PLN saja namun oleh semua pemangku kepentingan di sektor ketenagalistrikan. Hal tersebut mengemuka pada acara Launching HLN Ke-69, diskusi dan buka puasa bersama yang dilaksanakan di auditorium PT PLN (Persero), Kamis (22/7).

"MKI mengucapkan terima kasih kepada pemerintah melalui Ditjen ketenagalistrikan atas penunjukan dan penugasan ini," ujar Ketua Umum MKI harry Jaya Pahlawan. Ia mengungkapkan bahwa peringatan HLN ke-69 ini mengangkat tema 'Membangun Komitmen untuk Mempercepat Pemerataan Penyediaan Tenaga Listrik'. Dengan tema ini, diharapkan agar seluruh pemangku kepentingan dapat menunjukkan komitmennya untuk mempercepat pembangunan ketenagalistrikan demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kegiatan yang akan melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di sektor ketenagalistrikan ini dimulai dengan seminar dan pameran akan dipusatkan di Jakarta Convention Center (JCC) tanggal 1-3 Oktober mendatang. Selanjutnya rangkaian peringatan HLN ke-69 akan dilanjutkan dengan jalan sehat pada tanggal 26 Oktober, Coffee Morning pada 27 Oktober, serta turnamen golf pada tanggal 30 Oktober yang memperebutkan Piala Bergilir Menteri ESDM.

Selepas launching HLN ke-69 ini, mantan Sekretaris Kementerian negara BUMN Said Sidu menjadi moderator dalam acara diskusi yang bertema 'Percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung ekonomi nasional.' Dirjen Ketenagalistrikan Jarman dalam diskusi tersebut menyampaikan bahwa untuk mendukung pembangunan ketenagalistrikan, perlu kebijakan harga atau pricing policy yang tepat. "Sejak tahun 2013 pemerintah terus memperjuangkan tarif listrik sesuai dengan harga keekonomiannya," ujar Jarman. Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah terus memberikan subsidi kepada pelanggan tidak mampu sesuai amanat UU Ketenagalistrikan.

Jarman mengungkapkan bahwa pemerintah terus mengajak swasta untuk pembangunan ketenagalistrikan. Menurutnya dengan pricing policy yang baru membuat swasta, khususnya kawasan industri, terdorong untuk membangun pembangkit listriknya sendiri. Dengan skema Power Wheeling yang disiapkan oleh Pemerintah, PLN tetap menjadi penyedia utama listrik, namun swasta bisa membangun pembangkit listrik sendiri di luar kawasan industrinya. "Dengan skema seperti ini, diharapkan industri dapat mencukupi kebutuhan listriknya sendiri dan PLN dapat lebih baik lagi melayani masyarakat," ujar Dirjen. (PSJ)

Pemudik Dihimbau Matikan Peralatan Listrik Saat Meninggalkan Rumah

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo menghimbau masyarakat yang meninggalkan rumah untuk mudik ke kampung halaman saat Hari Raya Idul Fitri 1435 H mematikan semua peralatan listrik. Ia juga menghimbau agar para karyawan yang meninggalkan kantor mencabut sambungan komputer dan alat elektronik lainnya. “Hal tersebut dilakukan untuk mencegah hal-ha lyang mungkin terjadi saat rumah atau kantor kosong ditinggal pemudik,” ujar Wamen ESDM. Hal tersebut disampaikan Wamen EDM saat meninjau kesiapan sub sektor ketenagalistrikan jelang Hari ray Idul Fitri 1435 di kantor PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali (PLN P3BJB) yang berlokasi di Gandul, Limo, Cinere, Depok, Jumat (25/7).

Dalam kunjungan kerja tersebut Wamen ESDM didampingi oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana, Direktur Utama PT PLN (Persero) Nur Pamudji, serta para pejabat di lingkungan kementerian ESDM dan jajaran PT PLN (Persero). Dalam kunjungan kerja tersebut, Wamen ESDM mendapatkan penjelasan dari Dirut PT PLN Nur Pamudji mengenai kondisi pasokan listrik PT PLN jelang hari raya Idul Fitri yang jatuh dua hari lagi.

Menurut Nur Pamudji, berdasarkan pengalaman selama ini, beban puncak pada hari Raya Idul Fitri pada umumnya lebih rendah dibandingkan dengan beban puncak pada kondisi hari kerja (proyeksi berkurang 10-15%) dikarenakan pada hari tersebut industri yang mengkonsumsi tenaga listrik yang sangat besar dan perkantoran berhenti beroperasi (libur). Prakiraan kondisi pasokan tenaga listrik selama periode Lebaran 2014 pada Sistem Kelistrikan Jawa-Bali berada pada kondisi pasokan cukup.

Menurut Laporan PT PLN, londisi Sistem Kelistrikan Jawa-Bali pada saat ini dalam status Normal dengan Cadangan Operasi sebesar 3.029 MW dengan beban puncak tertinggi sebesar 23.227 MW dan Daya Mampu sebesar 26.256 MW. Perkiraan beban puncak tertinggi pada saat puncak perayaan Hari Raya Idul Fitri 1435 H adalah sebesar 14.524 MW dengan cadangan operasi sebesar 9.261 MW dan daya mampu sebesar 23.785 MW. Pihak PLN telah berkomitmen untuk tidak melakukan pemeliharaan yang dapat mengganggu pasokan listrik pada H-15 hingga H+15 terkecuali perbaikan yang disebabkan gangguan sehingga dapat meminimalisir terjadinya pemadaman listrik.

Dalam kesempatan tersebut, Wamen ESDM memberikan wejangan-wejangan kepada jajaran PT PLN (Persero) terkait pasokan listrik Indonesia ke depan. Pembangunan-pembangunan pembangkit dan kestabilan pasokan menjadi perhatian khusus Wamen ESDM dalam kunjungan kerja kali ini. Wamen ESDM juga memberikan apresiasi kepada PT PLN (Persero) yang terus bekerja untuk melistriki masyarakat di saat sedang libur merayakan Hari Raya

Halal Bi Halal, Dirjen Ketenagalistrikan Ajak Semua Karyawan Meningkatkan Kinerja

Senin (4/8) pagi, seluruh karyawan Direktorat Jenderal Ketenagalitrikan (DJK) berkumpul di Lobby Gedung Utama untuk bersilaturahmi setelah libur Hari Raya Idul Fitri 1435 H. Seluruh karyawan yang terdiri dari para Pegawai Negeri Sipil, tenaga konrak, pramusaji, jasa kebersihan hingga keamanan tersebut bersalam-salaman untuk memohon maaf lahir dan batin. Silaturahmi dimulai dengan menyalami Dirjen ketenagalistrikan Jarman beserta Ibu, para Direktur, pejabat dan seluruh karyawan. Hadir pula dalam kesempatan tersebut para stakeholder sub sektor ketenagalistrikan.

Dimulai dengan berdoa bersama yang dipandu oleh Fathorahman, para karyawan kemudian mendengarkan sambutan dari Dirjen Ketenagalistrikan. Dalam sambutannya Dirjen mengingatkan bahwa fungsi Ditjen Ketenagalistrikan selain sebagai perumus peraturan perundang-undangan dan kebijakan sektor ketenagalistrikan, juga menjalankan fungsi pengguna anggaran APBN sub sektor ketenagalistrikan. Jarman berharap momentum hari raya Idul Fitri ini dapat membawa semangat baru untuk meningkatkan kinerja yang berhubungan dengan ketiga fungsi tersebut.

Tak lupa Dirjen mewakili seluruh pimpinan Kementerian ESDM dan Ditjen Ketenagalistrikan memohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan yang diperbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja.

Usai mendengarkan sambutan dari Dirjen ketenagalistrikan, seluruh karyawan berbaris menyalami Dirjen, Direktur, Pejabat dan semua pegawai di Ditjen Ketenagalistrikan yang berjumlah lebih dari 300 orang. Suasana keakraban terjalin dalam silaturahmi yang singkat dan sederhana tersebut.

Pemerintah Harapkan Kajian-Kajian Ketenagalistrikan dari Perguruan Tinggi

Pertumbuhan kapasitas terpasang pembangkit listrik di Indonesia sejak tahun 2010 cukup tinggi. Masuknya berbagai pembangkit listrik yang masuk dalam program percepatan pembangkit listrik 10.000 MW tahap I, pembangkit-pembangkit dari anggaran PLN maupun IPP terus menambah kapasitas dan meningkatkan rasio elektrifikasi Indonesia. Namun pertumbuhan kapasitas tersebut belum mampu mencukupi pertumbuhan konsumsi listrik. Untuk itu pemerintah terus mengeluarkan kebijakan untuk menambah kapasitas pembangkit listrik, khususnya berbasis energi baru terbarukan (EBT) sembari mengharapkan kajian-kajian dari para akademisi.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Ir Arief Indarto dalam Seminar Nasional Energi dan Ketenagalistrikan yang diselenggarakan Jurusan Teknik Elektro Universitas hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (7/8). Menurut Arief, kapasitas pembangkit listrik di Indonesia hingga awal tahun 2014 adalah 50.665 GW. Pertumbuhan konsumsi energi listrik hingga akhir tahun 2013 adalah 7,8%. Sedangkan rasio elektrifikasi mencapai 80,51% sehingga masih terdapat 19,49 masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan akses terhadap listrik.

Arief berharap mahasiswa maupun Dosen terus meningkatkan kajian-kajian yang berhubungan dengan pembangunan ketenagalistrikan sehingga studi tersebut dapat dimanfaatkan bagi pembangunan ketenagalistrikan di Indonesia. Arief berharap studi perencanaan supply dan demand pembangkit listrik menjadi prioritas sebab akademisi mampu memikirkan hingga hal-hal teknis yang kadang luput dari perhatian pemerintah. “Sangat penting bagi kita untuk mengetahui keekonomian suatu pembangkit dalam suatu sistem secara menyeluruh,” ungkap Arief. Menurutnya pemerintah sebagai pembuat kebijakan sangat mengharapkan masukan-masukan teknis dari para akademisi.

Seminar nasional yang diselenggarakan di Gedung Iptek Universitas Hasanuddin tersebut dibuka oleh Rektor Unhas, Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. Selain Sekretaris Ditjen Ketenagalistrikan, hadir pula memberikan presentasi, Prof. Dr. Ir. Syamsir Abduh yang juga alumnus Universitas hasanuddin, serta Manager Perencanaan PT PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat yang menyampaikan presentasinya mengenai kondisi kelistrikan khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

Selepas semua pemateri menyampaikan paparannya, peserta seminar yang terdiri dari mahasiswa dan dosen dari berbagai perguruan tinggi se Indonesia ini memanfaatkan kesempatan yang ada untuk bertukar pikiran mengenai kondisi kelistrikan secara umum sembari mencari solusi dari perseoalan-persoalan yang ada. Sesditjen mengapresiasi kegiatan seperti ini dan berharap para akademisi terus melakukan kajian-kajian guna mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi pembangunan ketenagalistrikan di Indonesia.

Menteri ESDM Minta Pegawai Bekerja Untuk Kesejahteraan Rakyat

Dengan semangat proklamasi 17 Agustus 1945, para pegawai di Kementerian ESDM diminta untuk melaksanakan tugas yang diemban untuk semata-mata kesejahteraan rakyat. Hal tersebut disampaikan Menteri ESDM Jero Wacik saat menyampaikan amanat pembina upacara dalam upacara hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Mingu (17/8). Menteri mengajak seluruh peserta yang terdiri dari perwakilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian ESDM tersebut untuk menanyakan dalam hati apakah pekerjaan yang telah dilakukan selama ini sudah untuk kesejahteraan rakyat. ”Kita semua juga mempunyai tugas yang sudah kita laksanakan dan terus akan kita laksanakan, kita harus meyakini bahwa semua yang kita kerjakan adalah untuk kesejahteraan rakyat,” tambah Menteri.

Menteri ESDM dalam amanat tersebut mengajak seluruh peserta upacara untuk mendukung suksesi kepemimpinan hasil pemilu tahun 2014 dan melanjutkan pembangunan yang selama ini telah dilaksanakan, khususnya pembangunan sektor ESDM. Tujuan pembangunan adalah menuju masyarakat yang sejahtera", ujar Menteri. Hal tersebut sesuai dengan tema peringatan proklamasi kemerdekaan RI ke-69 yaitu 'Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945 Kita Dukung Suksesi Kepemimpinan Nasional Hasil Pemilu 2014 Demi Kelanjutan Pembangunan Menuju Indonesia yang Makin Maju dan Sejahtera'.

Menteri mengingatkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Dalam proses renegosiasi kontrak-kontrak pertambangan, Menteri meminta untuk tidak takut dengan perusahaan-perusahaan asing asalkan benar-benar untuk kesejahteraan rakyat. "Kita bangsa besar, kita bangsa yang berdaulat kalau dahulu pada tahun-tahun 1945, para pahlawan berjuang dengan bambu runcing berani menghadapi penjajah, maka sekarang kita harus lebih berani menghadapi perusahaan-perusahaan manapun didunia.. saya perintahkan, kita semua termasuk saya, sejengkalpun tidak boleh mundur untuk membela kepentingan Republik Indonesia," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri ESDM mengingatkan seluruh pegawai Kementerian ESDM untuk rela dan ikhlas dan tidak berhitung-hitung dalam bekerja. "Mari saudara-saudara sering-sering melihat betapa beraninya pahlawan-pahlawan kita, pejuang-pejuang kita sehingga kita bisa hidup seperti ini, tidak pernah beliau itu menghitung berapa honornya, berapa gajinya, kalau mereka berjuang, kalaupun mereka tewas dalam perjuangan tidak pernah mereka berhitung-hitung, itu yang saya ingin ada pada kita," ujar Menteri.

Upacara yang digelar di halaman Gedung Sekretariat Jenderal KESDM tersebut dihadiri pula oleh Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman dan para pejabat Eselon I dan II unit-unit Kementerian ESDM. Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Arief Indarto didaulat menjadi pembawa bendera. Dalam upacara tersebut juga dilaksanakan pemberian penghargaan Lencana Karya Satya bagi para PNS Kementerian ESDM yang telah bekerja selama 10, 20, dan 30 tahun.

Dirjen Ketenagalistrikan Serahkan Penghargaan Satyalancana Karya Satya

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Ir Jarman MSc pada Senin (18/8) memberikan penghargaan Presiden Republik Indonesia kepada 46 karyawan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang mendapatkan Satyalancana Karya Satya. Penghargaan ini diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Keputusan Presiden RI Nomor : 53/TK/Tahun 2013 dalam rangka peringatan hari proklamasi kemerdekaan RI ke-69.

Satyalancana Karya Satya adalah sebuah tanda penghargaan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah berbakti selama 10 atau 20 atau 30 tahun lebih secara terus menerus dengan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetian dan pengabdian sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lainnya. Satyalancana Karya Satya (SLKS) dibagi dalam tiga kelas, yaitu SLKS 10 Tahun, SLKS 20 Tahun, dan SLKS 30 Tahun. Bentuk dan warna pita penghargaan ini adalah warna dasar biru, dengan lima lajur abu –abu. Medali warna perunggu untuk tanda kehormatan SLKS 10 Tahun, warna perak untuk tanda kehormatan SLKS 20 tahun, serta warna emas untuk tanda kehormatan SLKS 30 Tahun. (PSJ)

Nama-nama pegawai yang mendapatkan tanda kehormatan SLKS tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Penghargaan SLKS 30 Tahun :

1 Ir. Emy Perdanahari, M.Sc, Ph.D.
2Drs. Tri Handoko, MA
3 Winsisma Wansyah, SH
4Suyanto, SE
5Bastari, SH
6 Warsini
7Sri Suharyati Agus Winarni
8Ayatullah
9 Noer Riyani
10 Agus Syarif Hidayat
11 Nelly Haryati
12 Gunandar Limartajaya
13 Sukarsih
14 Dwi Kussufeb Dwinanto
15 Sugino
16 Agus Iriansyah
17 Sinaryadi
18 Sulasto, S.AP.
19 Muchammad Muchtar
20 Adar
21 Suwarno
22 Achmad Yusuf Haryono
23 Sahri Mahmud
24 Miran
25 Moh. Nur

Penghargaan SLKS 20 Tahun

1 Ir. Jarman, M.Sc
2 Ir. Arief Indarto, M.M.
3 Ir. Jisman P. Hutajulu, MM
4 Ir. Budianto Hari Purnomo, MM
5 Ir. Agus Bahagianto
6 Ir. Edy Sampeliling
7 Zaenal
8 Emi Tursilah
9 Heppy Ari Kusuma

Penghargan SLKS 10 Tahun :

1 Felix Rudianto, ST
2 Andi Winarno, ST, MT
3 Yeni Rachmawati, SE, ME
4 Heru Setiawan, ST
5 Yeni Gusrini, ST
6 Muhadi, ST, MT
7 C. Ripura Sewana Sigit, ST
8 Albert Hasudungan Patuan ST MSc
9 Fitriyeni, SE
10 Muhammad Nur Taufik, ST, MBA
11 Iva Prasetyo Kusumaning Ayu, SE, ME
12 I l h a m, ST

Energi Aman dan Terjangkau Menjadi Prioritas ASEAN

Penyediaan energi yang andal dan terjangkau menjadi syarat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus mengingkatkan taraf hidup masyarakat ASEAN. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Ir Jarman MSc saat menjadi Keynote Speaker pada Workshop on Coal-Fired Power Generation in South East and East Asia Region yang diadakan di Jakarta Rabu (3/9). “Kemampuan negara-negara di kawasan ASEAN untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan taraf hidup warga negaranya harus sejalan dengan penyediaan energi yang andal dan terjangkau,” ujarnya.

Workshop yang diselenggarakan di Hotel Kempinski tersebut dilaksanakan secara bersama oleh Economic Research Institute for ASEAN & East Asia (ERIA) dan International Energy Agency (IEA). Workshop ini dilaksanakan untuk meninjau penyediaan tenaga listrik dari bahan bakar batu bara yang digunakan oleh sebagian besar negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur, tantangan dan solusi teknologi yang terjangkau. Acara ini dihadiri oleh penyedia jasa utilitas tenaga listrik di ASEAN, perwakilan ASEAN Forum on Coal (AFOC), Asosiasi pengusaha Batubara Indonesia (APBI), PT. PLN, Japan Coal (JCOAL), dan akademisi.

Dimana diketahui bahwa sejumlah sumber daya energi telah masuk ke dalam jaringan tenaga listrik, termasuk nuklir, air dan energi terbarukan, namun pembangkitan tenaga listrik yang memenuhi beban dasar masih menggunakan bahan bakar fosil khususnya batubara. Hal tersebut dikarenakan batubara merupakan solusi penyediaan tenaga listrik yang cukup aman, handal dan terjangkau pada skala yang cukup besar dan dapat dibangun dalam waktu yang singkat. Bahkan saat ini tulang punggung penyediaan tenaga listrik dunia berasal dari batu bara yang mencapai 40%. Pemanfaatan batu bara untuk pembangkit listrik bartambah sangat signifikan dalam lima tahun terakhir, bahkan tercapai tambahan kapasitas hingga 350 GW. Bahkan batubara sebagai tulang punggung penyediaan lebih dari setengah tenaga listrik di dunia.

“Namun seperti pepatah ‘No Pain, No Gain’, segalanya memiliki resiko,” ujar Jarman. Menurutnya tanpa tindakan yang pantas untuk mitigasi dampak yang timbul maka dapat mengancam iklim global. Selanjutnya untuk mengatasi dampak tersebut, teknologi yang sudah terbukti (proven technology) dan komersial (comercially sound) dengan memanfaatkanClean Coal Technology seperti penerapan teknologi Super-Critical dan Ultra Super-critical di pembangkit listrik skala besar, menjadi suatu peluang kerjasama internasional yang saling menguntungkan.

Untuk itu, kerangka kebijakan nasional dan regional termasuk mekanisme pembiayaan yang didukung oleh perbankan nasional dan dunia menjadi satu kesatuan yang padu sebagai penyangga pertumbuhan ekonomi regional dan dunia. Dalam penutup sambutannya, Jarman menyampaikan bahwa meskipun masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan, sebaiknya dikerjakan bersama. “Saya berharap melalui workshop ini akan membuka peluang saling berbagi pengetahuan dan kerjasama yang menguntungkan para pihak terkait untuk penerapan Clean Coal Technologybaik di dalam negeri masing-masing maupun di kawasan ASEAN,” tutupnya.

Dalam sambutan selanjutnya, Executive Director ASEAN Center for Energy (ACE) Christopher Zamora menyampaikan dukungan ACE kepada ERIA dan IEA atas workshop ini. Menurutnya peran batubara dalam konsumsi energi dunia terus meningkat, termasuk konsumsi energi final di ASEAN mencapai 10,3% pada tahun 2011, dari 6,6% pada tahun 2002, dan ACE memproyeksikan konsumsi tersebut akan terus meningkat hingga 13,5% pada tahun 2030. Sementara itu, batubara sebagai energi untuk pembangkitan tenaga listrik meningkat, dari tahun 2002 yang sekitar 23,6% menjadi 33% pada tahun 2011, bahkan diproyeksikan meningkat tajam hingga 47,4% pada tahun 2030 dalam skenario Business-as-Usual (BAU). Hal ini menjadikan batubara sebagai sumber utama pembangkitan tenaga listrik di tahun 2030. Hal ini dilandasi alasan bahwa biaya produksi dan transportasi yang murah, penyediaan bahan baku yang berlimpah menjadi pilihan sejumlah negara menjadikan batubara sebagai sumber utama pembangkitan listriknya hingga tahun 2030.

Secara global saat ini citra batubara merupakan produk kotor yang berkontribusi terhadap pemanasan global sertaberdampak pada lingkungan dan kesehatan manusia. Namun sebagaimana telah disampaikan Jarman sebelumnya,saat ini telah tersedia teknologi untuk pemanfaatan batubara yang lebih ramah lingkungan melalui Clean Coal Technologies (CCT) yang dapat mengurangi emisi karbon berbahaya. ACE meramalkan akan terjadi pertumbuhan pemanfaatan batubara dan CCT di dekade mendatang di mana seiring dengan inovasi teknologi, regulasi lingkungan dan hal lain yang mempengaruhi dinamika industri. Di balik itu, belakangan ini muncul gerakan untuk membatasi dukungan finansial dari negara maju dan perbankan internasional untuk pembiayaan pembangkit batubara baru.

ACE mengharapkan workshop ini dapat menyentuh isu ini dalam konteks ketahanan energi di kawasan ASEAN dan Asia Timur dan batubara sebagai sumber daya ekonomi untuk pembangunan dan perkembangan. Christopher melanjutkan, kerjasama batubara ASEAN di bawah payung the ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) 2010-2015, menyatakan bahwa tujuan kerjasama adalah untuk mendukung pengembangan dan pemanfaatan CCT dan memfasilitasi perdagangan batubara di kawasan ASEAN melalui peningkatan ketahanan energi regional, juga bekerjasama mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan pemanfaatan batubara seiring dengan upaya mengatasi dampak lingkungan. ACE dan the ASEAN Forum on Coal (AFOC) memiliki sejumlah kerjasama regional terkait batubara. Christopher menutup sambutannya dengan menyatakan bahwa ke depannya, APAEC 2016-2020, program CCT masih akan menjadi pendorong kerjasama energi regional ASEAN.

Seusai pembukaan workshop dilanjutkan dengan press conference yang dihadiri oleh Dirjen Ketenagalistrikan Jarman, Keith Burnard dan Shigeru Kimura. Pada kesempatan itu, ketiganya kembali menegaskan pentingnya pemanfaatan batubara sebagai sumber energi yang mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan regional ASEAN, namun perlu didukung dengan teknologi yang telah terbukti ramah lingkungan, dan pembiayaan perbankan atas investasi infrastruktur ketenagalistrikan. (RBS/PSJ)

Dirjen Ketenagalistrikan Buka Turnamen Futsal HLN Ke-69

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Ir Jarman MSc pada Jumat (19/9) membuka secara resmi turnamen futsal Piala Menteri ESDM" dalam rangka Hari Listrik Nasional ke-69. Acara yang diselenggarakan di Plaza terbuka kantor PT PLN (persero) tersebut dihadiri oleh para peserta turnamen futsal yang hendak bertanding memperebutkan piala bergilir yang pertama kali. Dalam sambutannya Dirjen berpesan agar para peserta terus menjaga sportivitas. Menurutnya bukan menang atau kalah yang menjadi tujuan akhir turnamen ini, tapi semangat kekeluargaan yang terjalin selama pertandingan adalah hal yang paling utama.

Menurut Jarman, sejak dua tahun ini penyelenggaraan peringatan Hari Listrik Nasional (HLN) sudah dilaksanakan oleh Masyarakat Ketenagalistrika Indonesia (MKI) dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di sektior ketenagalistrikan. "Salah satu rangkaian peringatan HLN adalah turnamen futsal memperebutkan pila Menteri ESDM yang pertama ini," ungkapnya. Ia juga menyambut baik rangkaian acara HLN lain seperti pameran dan seminar, upacara, hingga coffee morning yang akan menjadi puncak peringatan HLN ke-69 ini.

Menurut ketua MKI, Harry Jaya Pahlawan, turnamen futsal yang menggunakan sistem setengah kompetisi ini diikuti oleh perwakilan unit-unit PT PLN, asosiasi-asosiasi perusahaan, dan Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM. Ia juga melaporkan bahwa pertandingan-pertandingan akan dilaksanakan di salah satu lapangan Futsal

daerah Pancoran Jakarta Selatan. “Suasanaya sejuk, dan parkirnya luas” ujar Harry menggambarkan lokasi pertandingan.

Pembukaan Turnamen Futsal ini ditandai dengan penyerahan piala Menteri ESDM dari Dirjen Ketengalistkan kepada penanggung jawab turnamen futsal MKI. Tak ketinggalan, Dirjen Ketenagalisrtrikan melakukan tendangan pertama yang menandai secara resmi bergulirnya kompetisi ini. Selain dihibur dengan penampilan dance dan lagu-lagu, acara ini juga dimeriahkan oleh pertandingan ekshibisi antara tim Masyarakat Ketenaglistrikan All Star melawan Celebrity Futsal yang dibintangi oleh Darius Sinatria, Bedu, Riko Ceper dkk. (PSJ)

Wamen ESDM Hadiri The 32nd AMEM di Lao PDR

Perhelatan tahunan pertemuan menteri-menteri Energi se-ASEAN kembali digelar untuk yang ke-32 kalinya. Lao PDR yang tahun ini didaulat menjadi ketua kerjasama energi ASEAN, menjadi tuan rumah The 32nd ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM) and Its Associated Meetings merupakan. Acara ini merupakan pertemuan rutin tahunan para Menteri Energi di kawasan ASEAN dan dengan mitra wicaranya. Seluruh rangkaian pertemuan berlangsung pada tanggal 22 – 24 September 2014 di Don Chan Palace Hotel, Vientiane Capital, Lao PDR. Rangkaian acara dibuka dengan agenda the Senior Official Meeting on Energy (SOME) Preparatory for the 32nd AMEM pada tanggal 22 September 2014 dimana SOE Leader Indonesia Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman memimpin Delegasi Indonesia.

Dihari yang sama, agenda dilanjutkan dengan pertemuan the 13th SOME+3 Preparatory Meeting for the 11th AMEM+3. Acara ini merupakan pertemuan para pejabat tinggi energi ASEAN dengan 3 (tiga) mitra wicara dari China, Jepang, dan Republik Korea. Agenda hari pertama juga diisi dengan pertemuan EAS-ECTF (East Asia Summit Energy Cooperation Task Force) sekaligus sebagai Preparatrory Meeting for the 8th EAS-EMM.Disini para pejabat tinggi energi ASEAN bertemu dengan 8 (delapan) mitra wicara dari Australia, China, Jepang, India, New Zealand, Republik Korea, Rusia dan United States of America.

Di samping itu, kegiatan Panel Discussion berlangsung menyertai pelaksanaan pertemuan AMEM dengan agenda antara lain AEBF Forum/Conference (konferensi energi), Energy Exhibition (pameran tentang perkembangan tekonologi energi), dan ASEAN Energy Awards 2013 (penganugerahan ASEAN Energy Awards kepada para pemenang kompetisi berbagai kategori khususnya energi terbarukan, konservasi energi dan clean coal technology.

Pertemuan The 32nd AMEM and related meetings sendiri secara resmi dibuka oleh H.E. Thongsing Thammavong, Prime Minister of the Lao People's Democratic Republic. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa

pertemuan the 32nd AMEM ini berdampak penting terkait dengan tantangan terhadap perubahan iklim global, bencana alam dan lain-lainyang selanjutnya berdampak pada kehidupan penduduk warga negara di kawasan ASEAN. Namun sisi baiknya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi ASEAN telah meningkatkan standard hidup masyarakat, sehingga kebutuhan terhadap ketersediaan energi cenderung meningkat. Selanjutnya Prime Minister Lao PDR mendorong peningkatan kerjasama energi di kawasan ASEAN, dengan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman dan terus bekerja sama dalam kerangka dasar hukum dan kebijakan untuk promosi energi terbarukan, memperkuat kelitbangan dan studi energi terbarukan, termasuk mendorong integrasi jaringan listrik lintas batas negara.

Pertemuan The 32nd AMEM and related meetings secara resmi dibuka oleh H.E. Thongsing Thammavong, Prime Minister of the Lao People's Democratic Republic. Dalam kata sambutan pembukaannya, beliau menyampaikan bahwa pertemuan the 32nd AMEM ini berdampak penting terkait dengan tantangan terhadap perubahan iklim global, bencana alam dan lain-lainyang selanjutnya berdampak pada kehidupan penduduk warga negara di kawasan ASEAN; namun sisi baiknya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi ASEAN telah meningkatkan standard hidup masyarakat, sehingga kebutuhan terhadap ketersediaan energi cenderung meningkat. Selanjutnya Prime Minister Lao PDR mendorong peningkatan kerjasama energi di kawasan ASEAN, dengan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman dan terus bekerja sama dalam kerangka dasar hukum dan kebijakan untuk promosi energi terbarukan, memperkuat

kelitbangan dan studi energi terbarukan, termasuk mendorong integrasi jaringan listrik lintas batas negara.

Sidang AMEM dibuka oleh Wakil Menteri ESDM RI Susilo Siswoutomo, sebagai Outgoing Chairperson, yang dalam sambutan pembukaan menyatakan terima kasih yang tulus kepada pemerintah dan rakyat Lao PDR atas sambutan hangat dan keramahan atas semua delegasi dan untuk pengaturan yang sangat baik untuk pelaksanaan AMEM ke-32. Wamen ESDM menekankan bahwa energi akan selalu menjadi elemen kunci yang menghubungkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan keadilan sosial dan lingkungan yang memungkinkan dunia untuk berkembang. Dengan tema tahun ini: "Power Integration for ASEAN Prosperity", ia berharap untuk memiliki lebih banyak kontribusi untuk pengembangan Integrasi energi listrik dalam rangka untuk mencapai hasil yang nyata terhadap energi yang berkelanjutan serta untuk kemakmuran di kawasan ASEAN.

Wamen ESDM juga mencatat prestasi kerjasama energi melalui program kerja di bawah APAEC 2010-2015 yang berkaitan dengan keamanan pasokan, memastikan energi yang terjangkau, pengembangan efisiensi energi dan teknologi batubara bersih, meningkatkan dan mengembangkan energi terbarukan, mengurangi emisi gas rumah kaca, pengurangan intensitas energi (EI) dan menciptakan integrasi pasar di kawasan ASEAN. Dia lebih lanjut mengakui bahwa ASEAN telah masuk ke tahap yang lebih baik bagi integrasi ekonomi dan kerjasama regional di semua sektor dan bahwa ke sepuluh negara ASEAN telah berkomitmen untuk kerjasama yang saling menguntungkan dan kesempatan bagi kemakmuran dan keadilan. Dia juga mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam dan penghargaan atas dukungan yang kuat dan kerjasama ASEAN mendukung keketuaan Indonesia di AMEM sepanjang tahun lalu. (RBS/ PSJ)

Dirjen Ketenagalistrikan Hadiri FGD dengan UBIFRANCE

Dirjen Ketenagalistrikan, Jarman menghadiri FGD yang diselenggarakan oleh AFD French Agency for Development UBIFRANCE Jakarta Office, bersama the Economic Services Kedutaan Besar Perancis di Indonesia Senin (30/9) di The Plaza, Jakarta. FGD tersebut diselenggarakan sebagai inisiasi Pemerintah Perancis kepada sejumlah pelaku usaha asal Perancis untuk membuka kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan usaha khususnya investasi ketenagalistrikan di Indonesia. Beberapa diantara peserta yang hadir adalah perusahaan papan atas asal Perancis seperti PT. Schneider Indonesia, Energy Vinci, Alstom Energy, PT. Legrand Indonesia and beberapa perusahaan skala menengah dan kecil. Kehadiran mereka juga dalam rangka berpartisipasi pada Pameran Kelistrikan Indonesia 2014 yang berlangsung pada tanggal 1 – 3 Oktober 2014 di JCC Jakarta. FGD mengambil tema "Energy transition in Indonesia: roadmap and opportunities for external partners", dan dilakukan dengan saling berbagi informasi mengenai investasi, khususnya ketenagalistrikan. Partisipasi ini sebagai tindaklanjut kesepakatan bilateral yang dibuat antar Prime Minister of France François Fillon dan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada bulan Juli 2011. Kesepakatan tersebut dalam kerangka kerjasama energi dan kemitraan strategis.

Dalam kesempatan tersebut, Jarman yang didampingi Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Munir Ahmad, memaparkan tentang kebijakan sektor ketenagalistrikan di Indonesia dan peluang investasi ketenagalistrikan di Indonesia. Jarman menekankan bahwa kebutuhan kapasitas pembangkitan di Indonesia hingga tahun 2022 sekitar 57 GW sampai 60 GW yang membutuhkan investasi sangat besar untuk mendukung pertumbuhan pembangunan di Indonesia. Mempertimbangkan kapasitas pembiayaan PLN, maka pemerintah Indonesia membuka peluang penambahan kapasitas tenaga listrik tersebut diharapkan sebagian besar berasal dari IPP (Independent Power Producer) dan dari sejumlah unallocated project, di mana proyek tersebut belum memiliki pengembang dan sumber pendanaan. Jarman mengharapkan Investor Perancis berpartisipasi mengisi peluang unallocated project tersebut. Selanjutnya, Jarman menyatakan bahwa dengan berlimpahnya batubara sebagai sumber energi utama di Indonesia, maka pengembangan tenaga listrik masih akan mengandalkannya setidaknya sampai satu dekade mendatang, namun dengan semakin meningkatnya kewaspadaan akan dampak lingkungan yang timbul, maka Pemerintah Indonesia mendorong penggunaan Clean-Coal Technology (CCT) sebagai solusi teknologi khususnya untuk PLTU Batubara bertipe Super-Critical dan Ultra-Super Critical yang akan dikembangkan mendatang.

Hernadi Buhron, perwakilan dari Divisi Pengadaan IPP PLN menyampaikan bahwa PLN mendominasi 83% dari total kapasitas pembangkitan di Indonesia, dimana tahun 2013 masih didominasi oleh batubara 53%, dan akan terus bertambah menjadi 66% di tahun 2022, dan konsumsi minyak bumi berkurang dari 13% di tahun 2013 menjadi hanya 1,7% di tahun 2022. Selanjutnya ia menjelaskan tentang potensi pengembangan energi terbarukan di Indonesia, di antaranya potensi hydropower 75GW dan direncanakan 12,9GW hingga tahun 2027; dan potensi geothermal 29GW, di mana telah beroperasi 1,3GW dan 6,2GW

diharapkan akan dikembangkan dalam 10 tahun mendatang. Sementara energi terbarukan lainnya, seperti microhydro, surya, bayu, biomass, kelautan dan biofuel akan berperan di wilayah terpencil sesuai kondisi setempat.

Status IPP yang telah beroperasi sebanyak 44 proyek dengan total kapasitas pembangkitan 7.746MW, di mana 66% nya PLTU, PLTG 16% dan PLTPB 10%. IPP yang dalam tahap pelelangan/pengadaan saat ini sekitar 55 proyek dengan kapasitas pembangkitan 20,7GW yang 81% diantaranya PLTU, Hydro 8% dan Gethermal 7%. Sementara IPP dalam tahap konstruksi dan pembiayaan sebanyak 61 proyek dengan total kapasitas pembangkitan 9.612MW yang 68%nya PLTU diikuti 29% PLTPB. Selanjutnya Hernadi menjelaskan tentang pengembang IPP yang telah beroperasi di Indonesia, termasuk mekanisme pelelangan pengadaan oleh IPP yang melalui tiga metode, yaitu (i) Penunjukan Langsung, (ii) Pemilihan Langsung), dan (iii) Pelelangan Terbuka, di mana masing-masing memiliki syarat dan tarifnya sendiri. PLN menerapkan sejumlah kriteria dalam pelelangan terbuka tersebut, diantaranya kriteria bisnis, kriteria keuangan, kriteria pengalaman teknis dan pengalaman EPC/O&M. (RBS)

Direktur Teknik dan Lingkungan Membuka Forum PUIL ke-2 di Manado

"Kalau ada kebakaran pasti listrik yang di tuduh menjadi penyebabnya", hal ini dikatakan Agoes Triboesono selaku Direktur Teknik dan Lingkungan Kementerian ESDM pada pembukaan Forum Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) yang di selenggarakan pada Rabu (27/8) di Manado. Forum ini bertujuan untuk mensosialisasikan PUIL 2011 yang menjadi standar wajib bagi pemasangan istalasi listrik khususnya tegangan rendah.

Dalam laporannya, Kasubdit Standarisasi Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu menyampaikan bahwa acara Forum PUIL yang di selenggarakan di Manado yang rupakan forum kedua dari enam forum yang di rencanakan. Acara yang diikuti oleh Dinas ESDM, PT PLN (Persero), akademisi, asosiasi ketenagalistrikan, rumah sakit, mal dan pasar dilakukan dengan pengundang para penyusun PUIL 2011 dan diharapkan melalui forum ini mereka dapat mengerti tentang bagaimana memasang dan mengawasi instalasi listrik dengan benar sehingga bahaya-bahaya yang diakibatkan oleh adanya arus pendek sebagainya bisa dihindari atau di minimalisasi.

Pada lanjutan sambutannya Agoes Triboesono mengatakan bahwa tahun 2015 kita akan menghadapi masyarakan ekonomi ASEAN dimana tenaga kerja teknik dengan bebas bias bekerja antar negara. Guna menghadapi hal tersebut kita harus siap dan mempersiapkan diri dengan baik. Dalam hal instalasi listrik, kita harus mengerti dengan baik bagaimana cara menginstalasi dengan mengikuti standar-standar yang sudah ada. Setiap instalasi wajib menggunakan peralatan yang telah mempunyai SNI, sehingga dapat mengurangi resiko dari kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek.

Diakhir sambutannya, Agoe Triboesono menghimbah agar masyarakat jangan menganggap remeh soal listrik hanya karena listrik itu ada di dekat dan sekitar kita. Selama ini masyarakat mengangap mudah tentang listrik. "asal disambung nyala tanpa memperhatikan beban arus dianggap mereka sudah mengerti tentang listrik.", ujarnya. (JFN)

Pemanfaatan Energi Angin

PENULIS: AHMAD AMIRUDDIN

Pendahuluan

Energi angin telah dimanfaatkan selama ribuan tahun untuk menggerakkan mesin seperti penggilingan gandum, pompa air dan aplikasi mekanik lainnya. Penggunaan energi angin sebagai Pembangkit Tenaga Listrik semakin menarik dalam dekade terakhir karena sifatnya yang terbarukan. Di Indonesia Pembangkit Listrik dari energi angin disebut Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).

Menurut sejarahnya, upaya untuk membangkitkan energi listrik dari angin telah dilakukan sejak abad ke-19, yang dimulai oleh Professor James Blyth dari the Royal College of Science and Technology Inggris. Seiring perjalanan waktu, teknologi energi angin berkembang dengan pesat. Pada era 1980-an, perkembangan energi angin dianggap telah matang. Dari tahun 1980 s.d 2000an, biaya pembangunan PLTB menurun secara linear dan kapasitas pembangkitan meningkat secara signifikan. Saat ini, dibeberapa Negara Eropa, PLTB dianggap jenis pembangkitan listrik dengan biaya yang paling efektif. Dengan adanya perbaikan pada desain , biaya, dan reliability maka diharapkan dalam beberapa dekade ke depan perkembangan PLTB akan lebih meningkat.

Perkembangan PLTB juga semakin menarik dengan penempatan lokasinya di lepas pantai, yang secara teknis memiliki keunggulan dibanding dengan penempatan PLTB di daratan. Pada tahun 2010, total kapasitas pembangkitan PLTB diseluruh dunia telah mencapai 194 GW, 36 GW diantaranya baru dibangun pada tahun tersebut yang berarti 11 kali lipat kapasitas

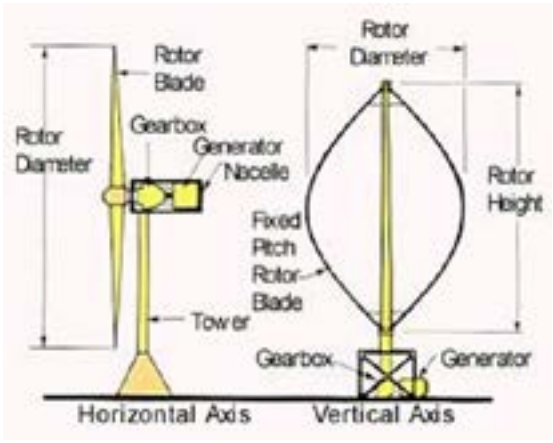

Sumber : http://www.windturbineworks.com/basics.html

dibanding yang dipasang pada tahun 2000. Secara rata-rata, pertumbungan PLTB diseluruh dunia mencapai 22% setiap tahun. (Boyle and Open University., 2012)

Turbin Angin (Wind Turbine)

Secara garis besar turbin angin terbagi atas dua konfigurasi. Horizontal Axis dan Vertikal Axis. Horizonal axis, sumbu putarnya sejajar dengan arah angin. Sementara Vertikal Axis, sumbu putarnya tegak lurus terhadap arah angin.

Horizontal Axis Wind Turbines (HAWT) secara umum memiliki 2 atau 3 blade atau bisa lebih. Turbin angin dengan banyak blade digunakan sejak abad ke-19 untuk pompa air di lahan pertanian.

Solidity digunakan untuk menggambarkan area sapuan turbin angin yang solid. Karenanya, turbin angin dengan jumlah blade yang banyak memiliki solidity tinggi (high solidity). Turbin angin yang memiliki area solid yang lebih kecil (area kosong lebih banyak) disebut low solidity. Turbin angin untuk pompa air memiliki turbin high solidity dan turbin untuk pembangkit listrik memiliki low solidity.

Turbin low solidity bekerja efektif bekerja efektif pada kecepatan putaran yang lebih tinggi

Horizontal Axis Wind Turbine (sumber : http://www.turbinesinfo.com/wp-content/uploads/2011/07/horizontal-axis-wind-turbine.jpg)

dibandingkan dengan high solidity.

Vertical Axis wind Turbine (VAWT) atau turbin angin sumbu vertikal, dapat mengekstrak tenaga angin dari semua arah tanpa perlu mengubah posisi rotor jika terjadi perubahan arah angin. Namun demikian, kekurangan dari jenis turbin ini adalah masalah power quality, siklus beban dan system tower yang lebih rumit dibanding HAWT, disampinng itu VAWT memiliki efisiensi lebih rendah dibandingkan dengan HAWT. Saat ini, secara komersial lebih banyak digunakan HAWT dibandingkan dengan VAWT.

Vertical Wind Turbine (Sumber : http://www.conserve-energy-future.com/VerticalAxisWindTurbines.php)

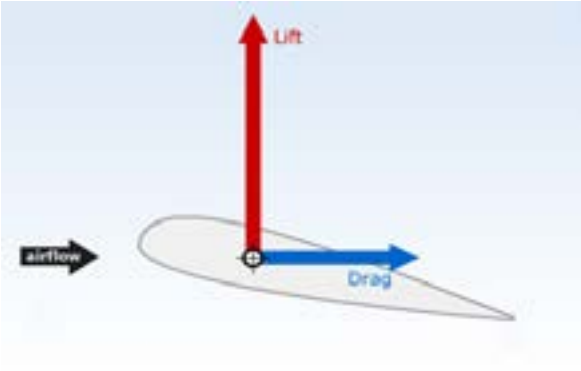

Aerodinamic pada Turbin Angin

Gaya yang bekerja pada pemanfaatan energi angin terdiri atas dua jenis gaya : gaya dorong (drag force) dan gaya angkat (lift force). Gaya dorong adalah komponen gaya yang sejajar dengan arah angin. Gaya angkat adalah gaya yang tegak lurus terhadap arah angin. Untuk energi angin, gaya angkat lebih banyak digunakan dibandingkan dengan gaya dorong.

Energi angin

Energi yang terkandung dalam angin adalah energi kinetik. Energi kinetic pada benda yang bergerak (angin) sebanding dengan setengah dari massa (m), dikali dengan kuadrat kecepatan angin (V).

Kinetic energi = setengah massa x kuadrat kecepatan = 1/2 mV^2 (1)

dimana m dalam kilogram dan V dalam meter per second
massa udara sendiri tergantung dari kerapatan massa udara ρ (pada ketinggian 0 diatas permukaan laut = 1.2256 kg/m3 dan debit udara (Q) yang melewati (volume/second). Volume udara dapat pula disubtitusikan sebagai perkalian antara luas bidang yang dilewati angin (A) dikalikan dengan kecepatan V.
sehingga:

m= ρ AV (2)
persamaan diatas dapat disubstitusikan ke persamaan (1), sehingga didapatkan

P=0.5 ρ AV^3 (Joule/second) atau (Watt)

Sehingga bisa disimpulkan bahwa daya pada angin sebanding dengan:

- Kerapatan massa dari udara
- Luas bidang yang dilewati angin
- Kecepatan angin

Nilai daya diatas adalah daya yang dapat dihantarkan oleh angin. Namun dalam aplikasinya, tidak ada peralatan mekanis yang dapat mengekstrak semua energi angin yang melewatinya. Persentase kemampuan ekstraksi ini disebut power coeeficient (Cp). Sehingga persamaan daya untuk energi angin menjadi.
P=0.5 Cp ρ AV^3

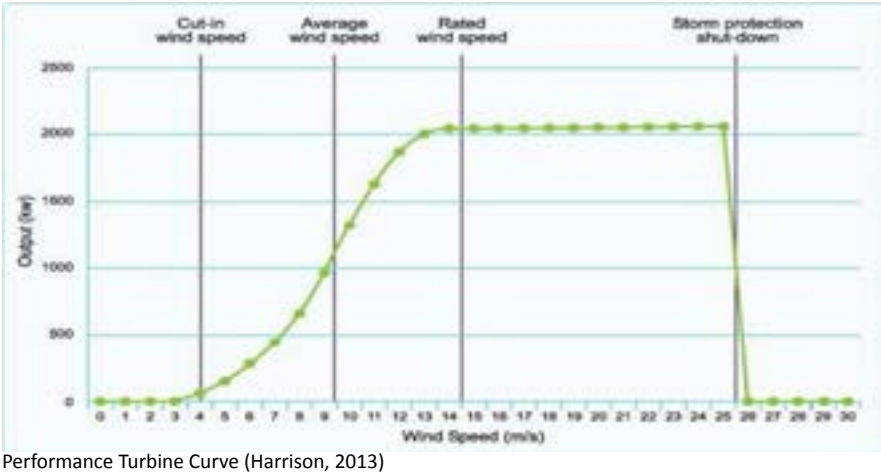

Performance Turbine Curve (Harrison, 2013)

Nilai Cp maksimum berdasarkan persamaan Bernoulli adalah 0.59
Performance Turbin
Dalam normal operasi, performance turbin angin digambarkan dengan Kurva Power dalam 4 zona operasi :

- Zona 1 : Sebelum kecepatan cut-in, P = 0
- Zona 2 : Diatas kecepatan cut-in dan dibawah kecepatan ratingnya, nilai P mengikuti polynomial
- Zona 3 : Diatas kecepatan rating dan dibawah kecepatan cut-out, nilai daya tetap sesuai dengan rating
- Zona 4 : diatas kecepatan cut-out, turbin shut down, P = 0

Kesimpulan:

- PLTB merupakan salah satu jenis pembangkit listrik dari energy terbarukan yang perkembangannya sangat pesat dan teknologinya telah dianggap mapan.
- Gaya yang lebih mempengaruhi dalam ekstraksi energy angin untuk pembangkit listrik adalah gaya angkat.
- Energi angin yang dapat diekstrak sangat tergantung kepada kerapatan massa udara, luas bidang cakupan angin, kecepatan angin dan peralatan mekanis yang digunakan.
- Performance turbin angin dapat dianalisa dari 4 zona yang dibatasi oleh kecepatan pada saat cut in, kecepatan rating dan kecepatan saat cut-out.

Reference:

- BOYLE, G. & OPEN UNIVERSITY. 2012. Renewable energy : power for a sustainable future, Oxford, Oxford University Press in association with the Open University.
- HARRISON, G. 2013. Wind Power : Lecture Technologies for Sustainable Energy. University of Edinburgh.
- "Vertical Axis Wind Turbines." ConserveEnergyFuture. N.p., n.d. Web. 26 Dec. 2013.

IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) SEBAGAI MODAL PERENCANAAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PERUSAHAAN PENGEMBANG ENERGI TERBARUKAN

1. Pendahuluan

CSR (Corporate Social Responsibility) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang terbaru, yakni UU Nomer 40 Tahun 2007. Melalui undang-undang ini, industri atau korporasi-korporasi wajib untuk melaksanakanya, tetapi kewajiban ini bukan suatu beban yang memberatkan. Perlu diingat pembangunan suatu negara bukan hanya tangungjawab pemerintah dan industri saja, tetapi setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat.

Industri dan korporasi berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup [1]. Melihat pada kondisional semacam ini maka penulis mencoba mengangkat permasalahan ini kepermukaan. Penulis menganggap bahwa pengambilan judul diatas cukup strategis.

Pertama, sebab sebenarnya konsep tanggungjawab sosial perusahaan telah dikenal sejak awal 1970, yang secara umum diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat, lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. Seiring perjalanan waktu, di satu sisi sektor industri atau korporasi-korporasi skala besar telah mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi di sisi lain ekploitasi sumber-sumber daya alam oleh sektor industri sering kali menyebabkan kerusakan lingkungan.

Kedua, adalah sebagai upaya untuk menegaskan hubungan perusahaan dengan aktifitas perniagaan yang diselenggarakan oleh para perusahaan. Dalam konteks perniagaan yang diselenggarakan terdapat hubungan timbal-balik antara personal perusahaan secara internal dan antara internal perusahaan dengan masyarakat luar perusahaan. Corporate Social Responsibility adalah suatu bagian hubungan perniagaan yang melibatkan perusahaan di satu pihak dan masyrakat sebagai lingkungan sosial perusahaan di pihak yang lain.

Ketiga[2] , CSR adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyrakat domisili. Secara teoritik, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggungjawab moral suatu peusahaan terhadap para stakeholdersnya, terutama komunitas atau masyarakat di sekitar wilayah kerja atau operasionalnya.

Di tahun 1970-an, topik CSR mengemuka melalui tulisan Milton Friedman tentang bentuk tunggal tanggungjawab sosial dari kegiatan bisnis. Bahkan Estes[3] menilai bahwa roh atau semangatnya telah ada sejak mula berdirinya perusahaan-perusahaan (di Inggris), yang tugas utamanya adalah untuk membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat sikap dan pendapat pro-kontra selalu merupakan bagian dari sejarah kehidupan perusahaan dan perkembangan konsep CSR itu sendiri. Pro dan kontra terhadap perkembangan CSR terus bergulir. Salah satunya, apakah tanggungjawab sosial tersebut sifatnya wajib atau sukarela, dimana ketika kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) diwajibkan dalam Undang-Undang. Nomer 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU. PT), sehingga menuai banyak protes. Pasalnya aktivitas CSR diasumsikan sebagai aktivitas berdasarkan kerelaan dan bukannya ”paksaan”.

Memang bibit-bibit CSR berawal dari semangat filantropis perusahaan. Namun, tekanan dari komunitas yang keras, terutama ditengah masyarakat yang kritis semacam masyarakat Eropa, yang menjadikan CSR menjadi semacam social license to operation, dan ini dilakukan oleh komunitas, bukan oleh negara[4]. Kritik lainnya, dalam pelaksanannya CSR masih memiliki kekurangan. Program-program CSR yang banyak dijalankan oleh perusahaan banyak yang hanya memiliki pengaruh jangka pendek dengan skala yang terbatas. Program-program CSR yang dilaksanakan seringkali kurang menyentuh akar permasalahan komunitas yang sesungguhnya. Seringkali pihak perusahan masih mengangap dirinya sebagai pihak yang paling memahami kebutuhan komunitas, sementara komunitas dianggap sebagai kelompok pinggiran yang menderita sehingga memerlukan bantuan perusahaan. Di samping itu, aktivitas CSR dianggap hanya semata-mata dilakukan demi terciptanya reputasi perusahaan yang pasif bukan demi

perbaikan kualitas hidup komunitas dalam jangka panjang [5].

Kritik lain dari pelaksanaan CSR adalah karena seringkali diselenggarakan dengan jumlah biaya yang tidak sedikit, maka CSR identik dengan perusahan besar yang ternama. Yang menjadi permasalahan adalah dengan kekuatan sumberdaya yang ada dengan kekuatan sumber daya yang dimilikinya, perusahan-perusahan besar dan ternama ini mampu membentuk opini publik yang mengesankan seolah-olah mereka telah melaksanakan CSR, padahal yang dilakukanya hanya semata-mata hanya aktivitas filantropis, bahkan boleh jadi dilakukan untuk menutupi perilaku-perilaku yang tidak etis serta perbuatan melanggar hukum [6].

Diidentikkannya CSR dengan perusahaan besar dan ternama membawa implikasi lain. Bila perusahaan besar dan ternama tersebut melakukan perbuatan yang tidak etis bahkan melanggar hukum, maka sorotan tajam publik akan mengarah kepada mereka. Namun bila yang melakukannya perusahaan kecil atau menengah yang kurang ternama, maka publik cenderung untuk kurang peduli, ataupun publik menarik perhatian, perhatian yang diberikan tidak sebesar bila yang melakukannya adalah perusahaan besar yang ternama. Padahal perilaku-perilaku yang tidak etis serta perubahan melanggar hukum yang dilakukan oleh siapapun tidak dapat diterima[7].

Seberapa penting CSR bagi perusahaan tetap menjadi wacana dalam praktis bisnis, pro dan kontra ini tidak bisa dilepaskan dari fenomena perbenturan kepentingan antara pencapaian profit dengan pencapaian tujuan sosial. Jika diperhatikan, masyarakat sekarang hidup dalam kondisi yang dipenuhi beragam informasi dari berbagai bidang, serta dibekali kecanggihan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Pola seperti ini mendorong terbentuknya cara pikir, gaya hidup, dan tuntutan masyarakat yang lebih tajam. Seiring dengan perkembangan ini, tumbuh suatu gerakan konsumen yang dikenal sebagai vigilante consumerism yang kemudian berkembang menjadi ethonical consumerism [8].

Perusahaan merupakan salah satu sendi kehidupan masayarakat modern, karena perusahaan merupakan salah satu pusat kegiatan manusia guna memenuhi kehidupannya. Selain itu, perusahaan juga sebagai salah satu sumber pendapatan negara melalui pajak dan wadah tenaga kerja. Dapat dikatakan bahwa suatu perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus-menerus, bersifat tetap, dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba yang dibuktikan dengan pembukuan. Hubungan ideal antara bisnis dengan masyarakat menjadi suatu masalah perdebatan (a matter of debate). Pendukung konsep tanggung jawab sosial (social responsibility) memberi argumentasi bahwa suatu perusahaan mempunyai kewajiban terhadap masyarakat selain mencari keuntungan. Ada beberapa definisi tentang CSR, yang pada dasarnya adalah etika dan tindakan untuk turut berperan dalam keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan perusahaan. Pada hakekatnya setiap orang, kelompok dan organisasi mempunyai tanggung jawab sosial (Social Responsibility) pada lingkungannya. Tanggung jawab sosial seseorang atau organisasi adalah etika dan kemampuan berbuat baik pada lingkungan sosial hidup berdasarkan aturan, nilai dan kebutuhan masyarakat. Berbuat baik atau kebajikan merupakan bagian dari kehidupan sosial. Dan segi kecerdaan, berbuat kebajikan adalah salah satu unsur kecerdasan spiritual. Sementara dalam konteks perusahaan, tanggung jawab sosial itu disebut tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility--CSR).

Secara etika bisnis, perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal kepada pemegang saham atau shareholder, tetapi juga mempunyai kewajiban terhadap pihak-pihak lain secara sosial termasuk masyarakat disekitarnya. Karena itu CSR adalah nilai moral yang semestinya dilaksanakan atas panggilan nurani pemilik atau pimpinan perusahaan bagi peningkatan kesejahteraan stakeholder perusahaan. Stakeholders adalah seseorang atau kelompok orang yang kena pengaruh langsung atau tidak langsung atau pada kegiatan bisnis perusahaan, atau yang mempengaruhi langsung atau tidak langsung kegiatan bisnis perusahaan. Stakeholders perusahaan meliputi pesaham, pemimpin, pekerja, penyedia barang dan jasa (mitra atau supplier), pesaing, konsumen, pemerintahan dan masyarakat.

Riset yang dilakukan oleh Roper Search Worldwide menujukan 75% responden memberi nilai lebih kepada produk dan jasa yang dipasarkan oleh perusahaan yang memberi kontribusi nyata kepada komunitas melalui program pembangunan. Sekitar 66% responden juga menunjukan mereka siap berganti merk kepada merek perusahaan yang memiliki citra sosial yang positif. Hal ini membuktikan terjadinya perluasan ”minat” konsumen dari produk menuju korporat.[9] Konsumen menaruh perhatiannya terhadap tanggungjawab sosial perusahaan yang lebih luas, yang menyangkut etika bisnis dan tanggungjawab sosialnya. Kepedulian konsumen telah meluas dari sekedar kepada

korporatnya . Konsumen semacam ini tidak hanya peduli pada faktor pemenuhan kebutuhan pribadi sesaat saja. Tetapi juga peduli pada penciptaan kesejahteraan jangka panjang. Meningkatnya tingkat kepedulian kualitas kehidupan, harmonisasi sosial dan lingkungan ini juga mempengaruhi aktivitas dunia bisnis, maka, lahirlah gugatan terhadap peran perusahaan agar mempunyai tanggungjawab sosial. Disinilah salah satu manfaat yang dapat dipetik perusahaan dari kegiatan CSR. Dalam konteks inilah aktifitas Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi menu wajib bagi perusahaan, di luar kewajiban yang digariskan undang-undang [10].

Hubungan antara komunitas dan perusahaan telah mengalami pergeseran. Awalnya perusahaan meluncurkan program Community Development (CD) dalam upayanya membina hubungan dengan komunitas. Kemudian dengan aktivitas CSR sebagai lisensi sosial untuk beroperasi. Terakhir, perusahaan dituntut untuk mempunyai peranan kepemimpinan dalam komunitasnya. Namur, ternyata hanya sekedar menjalankan aktivitas CSR tidaklah lagi mencukupi. Sekali lagi, ini bukan berarti CSR kehilangan relevansinya. CSR tetap penting dan harus dijalankan. Namun disamping CSR, perusahaan perlu mengambil insentif kepemimpinan sosial. Inilah yang diistilahkan oleh Hills dan Gibbon dengan Corporate Social Leadership (CSL) [11].

Konteks CSL menegaskan bahwa perusahaan bukan hanya dituntut untuk menjalankan tanggungjawab sosialnya, namun juga harus menjadi sebuah institusi yang memimpin, memberikan inspirasi bagi terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat, sehingga kualitas hidup masyarakat secara umum meningkat dalam jangka panjang. Perusahaan harus menyadari bahwa dirinya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat yang lebih luas, sehingga hal buruk yang menimpa dan merugikan masyarakat pada giliranya akan berdampak pada mereka juga.

Oleh karena perusahaan harus memerlukan komunitasnya sebagai mitra, program-program yang dilaksanakan harus mampu benar-benar memberdayakan masyarakat, artinya masyarakat yang memiliki daya tahan yang tinggi serta mampu memecahkan setiap persoalan yang dihadapi dengan kekuatan sendiri dalam jangka panjang. Dunia industri sering menjadi tertuduh utama dalam masalah kerusakan lingkungan, karena "kerakusannya" dalam mengekploitasi sumber daya alam, tetapi industri pula yang menjadikan peradaban manusia maju dengan pesat. Tak dapat dipungkiri bahwa kemampuan dalam menguasai industri menjadi parameter kualitas kehidupan manusia. Masalahnya adalah bagaimana mengolah jalan simpang diantara dua kepentingan : kepentingan industri dan kelestarian lingkungan.

Tekanan dari stakeholders yang tumbuh dari kesadaran terhadap kelestarian lingkungan, telah merasuk ke dalam dunia korporasi dan praktik-raktik manajemen, misalnya institusionalisasi yang dituangkan dalam ISO 14000. Demikian juga konsep produksi telah mengalami kemajuan dari konsep cradle to grave menjadi daur ulang. Cradle to cradle seperti yang diterapkan oleh Xerox. Berarti industri tidak hanya mengamankan agar sampah atau limbah tidak mencemari lingkungan, tetapi juga berusaha agar sampah atau limbahnya dapat didaur ulang. Menjadi "hijau" bukan hanya mengubah proses dan produk, yang hanya berkuat di proses internal pabrik belaka. Tetapi juga memperdulikan ke "hijauan"nya mulai dari bahan baku yang digunakan dan kualitas perusahaan pemasok dipandang dari kacamata sadar lingkungan, seperti yang tertuang dalam standarisasi ISO 14000.

Perusahaan juga harus bertanggungjawab terhadap aktivitas-aktivitas untuk meminimalkan dampak negative dari sisa produk yang dihasilkan, penanganan limbah maupun "sampah" dari produk yang sudah terpakai, seperti kemasan, namun kesemuanya hanya dapat terlaksana secara efektif dan efisien bila didukung sistem manajemen yang baik, serta dilandasi oleh budaya perusahaan yang peduli terhadap lingkungan, dimana hal ini dapat dilakukan terutama pada perusahan-perusahaan besar. Karena itu salah satu cara untuk menyebarkan ide-ide "hijau" adalah dengan mendorong perusahan-perusahaan besar agar memaksa para pemasoknya atau sub kontraknya untuk lebih ramah terhadap lingkungan.

Tekanan masyarakat agar perusahan lebih peduli kepada lingkungan merupakan kesempatan untuk memperkuat antara perusahaan dengan konsumen, bahkan dapat dijadikan keunggulan kompetitif. Konsumen yang semakin sadar terhadap isu lingkungan akan mencari produk yang bersahabat dengan lingkungan. Sebagai dampak ikutannya perusahaan akan mencari pemasok yang bisa memecahkan persoalan-persoalan lingkungan. Hubungan antar perusahaanpun akan berubah, karena sama-sama ditekan untuk menjadi hijau. Maka banyak perusahaan, terutama perusahaan besar, mulai cerewet terhadap perusahaan-perusahaan pemasoknya. Bagi perusahaan-perusahaan besar reputasi adalah aset terpenting perusahaan. Walaupun hanya belakangan ini

istilah CSR dikenal, sesungguhnya aktivitas community outreach atau penjangkauan masyarakat sudah dilakukan oleh perusahaan sejak dahulu kala. Bentuk community outreach yang paling primitif adalah corporate philanthropy. Yang terakhir ini merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh perusahaan, atau seseorang, untuk memberikan dana kepada individu atau kelompok masyarakat, misalnya dalam bentuk beasiswa.[12] Seiring waktu berlalu, Corporate philanthropy (CP) kemudian berkembang menjadi Corporate Social Responcibility (CSR). CSR berbeda dengan philantropy dari dimensi keterlibatan si pemberi dana dalam aktivitas yang dilakukannya. Kegiatan CSR seringkali dilakukan sendiri oleh perusahaan, atau dengan melibatkan pihak ketiga (misalnya yayasan atau lembaga swadaya masyarakat) sebagai penyelenggara kegiatan tersebut. Yang jelas, melalui CSR perusahaan jauh lebih terlibat dan terhubung dengan pihak pertama (beneficiaries) dalam aktivitas sosial dibandingkan dengan CP. Aktivitas sosial yang dilakukan melalui CSR pun jauh lebih beragam.[13] CP maupun CSR biasanya dilakukan oleh para miliyoner ataupun perusahaan multinasional yang memiliki pendapatan yang tinggi. Oleh karena itu. Banyak kegunaan dari usaha menengah dan kecil untuk melakukan CP dan CSR. Namun dalam praktiknya, CP maupun CSR sering dilakukan sebagai salah satu bagian dari promosi produk, atau yang sering disebut sebagai social-marketing.[14]

2. Manfaat Praktis

Dari sisi perusahaan terdapat berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari aktivitas CSR. Pertama, mengurangi resiko dan tuduhan terhadap perilaku tidak pantas yang diterima perusahaan. Perusahaan yang menjalankan tanggungjawab sosialnya secara konsisten akan mendapatkan dukungan luas dari komunitas yang telah merasakan manfaat dari berbagai aktifitas yang dijalankannya. CSR akan mendongkrak citra perusahaan, yang dalam rentang waktu panjang akan meningkatkan reputasi perusahaan. Manakala terdapat pihak-pihak tertentu yang menuduh perusahaan melakukan perilaku serta menjalankan praktek-praktek yang tidak pantas, masyarakat akan menunjukan pembelaanya. Karyawan pun akan berdiri dibelakang perusahaan, membela tempat industri mereka bekerja.

Kedua, CSR dapat berfungsi sebagai pelindung akan membantu perusahaan meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis. Demikian pula ketika perusahaan diterpa kabar miring bahkan ketika perusahaan melakukan kesalahan, masyarakat lebih mudah memahami dan memanfaatkannya. Karena perusahaan dianggap konsisten dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya, maka masyarakat dapat memaklumi dan memanfaatkanya sehingga relatif tidak mempengaruhi aktivitas dan kinerjanya.

Ketiga, keterlibatan dan kebanggaan karyawan. Karyawan akan merasa bangga bekerja pada perusahaan yang memiliki reputasi yang baik, yang secara konsisten melakukan upaya-upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Kebanggan ini pada akhirnya akan menghasilkan loyalitas, sehingga mereka merasa lebih termotivasi untuk bekerja lebih keras demi kemajuan perusahaan. Hal ini akan berujung pada peningkatan kinerja dan produktivitasnya.

Keempat, CSR yang dilaksanakan secara konsisten akan mampu memperbaiki dan mempererat hubungan antara perusahaan dengan para stakeholdersnya. Pelaksanaan CSR secara konsisten menunjukan bahwa perusahaan memiliki kepedulian terhadap lancarnya berbagai aktivitas secara kemajuan yang mereka raih. Hal ini mengakibatkan para stakeholders senang dan merasa nyaman dalam menjalankan hubungan dengan perusahaan.

Kelima, meningkatnya penjualan seperti yang terungkap dalam riset Search Worldwide, konsumen akan lebih menyukai produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang konsisten menjalankan tanggungjawab sosialnya sehingga memiliki reputasi yang baik.

Dan keenam, insentif-insentif lainnya seperti insentif pajak dan berbagai perlakuan khususnya lainnya. Hal ini perlu dipikirkan guna mendorong perusahaan agar lebih giat lagi menjalankan tanggungjawab sosialnya.

3. Alasan-Alasan Perusahaan Melaksanakan CSR

Setidaknya ada tiga alasan penting dan manfaat yang diperoleh suatu perusahaan dalam merespon dan menerapkan isu tanggung jawab sosial (CSR) yang sejalan dengan operasi usahanya.

Pertama, perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan juga turut memperhatikan kepentingan masyarakat. Dengan adanya penerapan CSR, maka perusahaan secara tidak langsung telah menjalin hubungan dan ikatan emosional yang baik terhadap shareholder maupun stakeholders.

Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme (saling mengisi dan meguntungkan). Bagi perusahaan,

untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, setidaknya licence to operate, adalah suatu keharusan bagi perusahaan jika dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga bisa mendongkrak citra dan performa perusahaan.

Dan Ketiga, kegiatan CSR merupakan salah satu cara untuk mengeliminasi berbagi potensi mobilisasi massa (penduduk) untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan sebagai akses ekslusifisme dan monopoli sumber daya alam yang dieksploitasi oleh perusahaan tanpa mengedepankan adanya perluasan kesempatan bagi terciptanya kesejahteraan dan pengembangan sumber daya manusia yang berdomisili di sekitar wilayah operasi perusahaan pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Suatu perusahaan, jangan pernah mengidap penyakit amputasi sosial, yakni kelumpuhan rasa untuk menolong ketika menyaksikan warga tidak mampu (miskin) disekitarnya. Sebab, hal ini dapat mengundang bertebarannya konflik horizontal sehingga perusahaan akan merasa dirugikan oleh sikap dan perilaku merusak warga.

Kepedulian sosial perusahaan terutama didasari alasan bahwasannya kegiatan perusahaan membawa dampak – for better or worse, bagi kondisi lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat, khususnya di sekitar perusahaan beroperasi. Selain itu, pemilik perusahaan sejatinya bukan hanya shareholders atau para pemegang saham. Melainkan pula stakeholders, yakni pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan.

Stakeholders dapat mencakup karyawan dan keluarganya, pelanggan, pemasok, masyarakat sekitar perusahaan, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, media massa dan pemerintah selaku regulator. Jenis dan prioritas stakeholders relatif berbeda antara satu perusahaan dengan lainnya, tergantung pada core bisnis perusahaan yang bersangkutan. Sebagai contoh, menempatkan masyarakat dan lingkungan sekitar sebagai stakeholders dalam skala prioritasnya.

Kepedulian kepada masyarakat sekitar/relasi komunitas dapat diartikan sangat luas, namun secara singkat dapat dimengerti sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi organisasi dan komunitas. CSR adalah bukan hanya sekedar kegiatan amal, di mana CSR mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibat terhadap seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) perusahaan, termasuk lingkungan hidup. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk membuat keseimbangan antara kepentingan beragam pemangku kepentingan eksternal dengan kepentingan pemegang saham, yang merupakan salah satu pemangku kepentingan internal.

4. Efektifitas Konsep CSR Dalam Menangani Permasalahan-Permasalahan Sosial dan Lingkungan

Di dalam keterbatasan sumber daya maupun pendanaan, mencari solusi terhadap penyakit, masalah dan penyediaan kebutuhan masyarakat, seringkali mengalami kebuntuan. Contoh penyakit sosial antara lain seperti tindakan korupsi yang sudah dianggap hal yang biasa. Sedangkan masalah masyarakat antara lain misalnya kesenjangan ekonomi yang cenderung semakin melebar, mewabahnya penyakit seperti flu burung, demam berdarah yang tak kunjung tuntas, banjir bandang yang hampir secara rutin dialami beberapa daerah tertentu, dan sebagainya. Meskipun tanggung jawab utama dalam mengatasi hal tersebut berada pada Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, namun sesuai dengan porsinya hal ini juga merupakan tanggung jawab semua pihak sebagai anggota masyarakat. Kita tahu Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan APBN/ APBD, namun upaya yang paling penting dilakukan oleh Pemerintah adalah memetakan penyakit dan masalah masyarakat itu secara komprehensif berikut solusi mengatasinya. Beberapa proyek strategis yang tanggung jawab utamanya berada pada Pemerintah, tentu dapat dibiayai oleh APBN maupun APBD, selebihnya kita bisa melibatkan dunia usaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk secara bersama-sama mengatasi secara tuntas penyakit dan masalah masyarakat tersebut.

Dari sisi dunia usaha, kecenderungan belakangan ini, Corporate Social Responsibility (CSR) tidak lagi dipandang sebagai cost center tetapi sudah menjadi bagian dari strategi usaha dalam meningkatkan keuntungan dan pertumbuhan usaha yang stabil. CSR lahir dari desakan masyarakat atas perilaku perusahaan yang biasanya mengabaikan tanggung jawab sosial seperti perusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, mengemplang pajak, menindas buruh, dan sejenisnya. Intinya, keberadaan perusahaan berdiri secara berseberangan dengan kenyataan kehidupan sosial. Namun, kini situasi semakin berubah, konsep dan praktik CSR sudah menunjukkan gejala baru sebagai suatu strategi perusahaan yang dapat memacu dan menstabilkan pertumbuhan usaha

secara jangka panjang. Sebagai contoh Perusahaan meluncurkan program CSR tentang sosialisasi air bersih. Program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang mendambakan kehidupan bersih jauh dari penyakit. Di sisi Perusahaan program ini akan meningkatkan penjualan produk kebersihannya.

Jelas dalam hal ini Pemerintah Daerah memerlukan dukungan dunia usaha dan masyarakat pada umumnya dalam mengatasi penyakit dan masalah masyarakat tersebut. Dunia usaha juga sudah menempatkan CSR sebagai strategi usaha dalam meningkatkan keuntungan dan pertumbuhan usaha yang stabil. Namun, yang menjadi persoalan adalah upaya yang sudah dilakukan oleh suatu perusahaan bisa jadi tumpang tindih dengan perusahaan yang lain atau bisa juga hanya terfokus pada masalah tertentu saja. Dalam kaitan ini, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan LSM seyogyanya melakukan upaya bersama dalam mengatasi penyakit dan masalah sosial tersebut. Harapan kita tidak lain tuntasnya penanggulangan penyakit dan masalah sosial yang ada, sekaligus terjadi sinergi yang saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat pada umumnya.

5. Parameter Keberhasilan Pelaksanaan CSR

Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral akhirnya menyatakan apa saja aspek yang akan menjadi fokus penilaian, yaitu pendapatan negara, jumlah produksi, dampak terhadap lingkungan dan dana pengembangan masyarakat (Koran Tempo 22/3). Empat aspek tersebut konsisten dengan pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial yang terkenal dengan sebutan triple bottom line.

Hanya saja, ada dua ganjalan dalam hal pengembangan masyarakat. Pertama adalah bahwa sudah seharusnya seluruh program sosial dinilai, bukan saja yang berkenaan dengan pengembangan masyarakat. Ini demi keadilan penilaian terhadap yang telah mencurahkan sumberdayanya. Kedua, kalau memang hanya program pengembangan masyarakat yang menjadi fokus, sudah seharusnya bukan semata-mata masalah dana saja yang dinilai.

Aspek sosial, sebagaimana aspek lingkungan, tidaklah mungkin direduksi menjadi ukuran-ukuran finansial. Pembiayaan merupakan fungsi dari program, dan karenanya ukuran finansial seharusnya menjadi salah satu indikator saja. Secara umum, program sosial perusahaan biasa dinilai dari masukan, proses dan kinerjanya. Kalau hal ini diikuti, maka banyak indikator lain yang bisa dipergunakan untuk menilai program pengembangan masyarakat.

Pertama-tama, harus disadari bahwa program pengembangan masyarakat yang memadai haruslah diintegrasikan ke dalam strategi menyeluruh perusahaan, bukan sekedar tempelan. Untuk menilainya, beberapa indikator dapat dipergunakan, yaitu: Adanya kebijakan tertulis perusahaan mengenai pentingnya membangun hubungan baik dengan masyarakat yang terkena dampak operasi perusahaan. Terdapatnya bagian khusus yang menanganinya pengembangan masyarakat yang bekerja secara efektif dengan bagian lain yang terkait dengan aktivitas hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Sumberdaya manusia yang bekerja untuk bagian itu memiliki kapabilitas yang memadai dari segi pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja. Adanya rencana kerja strategik untuk waktu lima tahun, dilengkapi dengan rincian program setahunan yang telah disepakati bersama-sama pemangku kepentingan serta mekanisme penyesuaian rencana. Dan tersedianya dana yang mencukupi untuk melaksanakan program yang direncanakan.

Perusahaan pengembang energy terbarukan dalam operasinya pasti mengakibatkan dampak negative sosial dan lingkungan bagi masyarakat yang berada di sekitarnya. Pengembangan masyarakat dapat dipandang sebagai salah satu bentuk upaya mengkompensasi dampak tersebut, di luar minimisasi dampak yang wajib juga dilakukan oleh perusahaan. Tanpa penyelesaian permasalahan dampak negatif, sangatlah sulit bagi perusahaan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Karenanya perusahaan seharusnya melakukan perhitungan dampak dengan terperinci sebagai dasar dari pengembangan masyarakat. Sebagai konsekuensi penghitungan dampak, besaran program harus dibedakan menurut wilayah dan kelompok dampak.

Semakin besar suatu wilayah atau kelompok masyarakat terkena dampak negative aktivitas perusahaan, semakin besar hak mereka untuk memperoleh program. Dalam hal tersebut, tiga indikator dapat diajukan, yaitu: Penilaian kerusakan yang diderita masyarakat dilakukan secara bersama-sama antara perusahaan dan masyarakat, dengan disaksikan oleh pihak lain yang netral.

Negosiasi harga kompensasi kerusakan dilakukan dengan cara-cara yang jujur, diterima masyarakat setempat, tanpa paksaan dan tipuan. Dan pembayaran kompensasi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat, baik dalam arah individu maupun kelompok. Penting disadari

bahwa perusahaan bukanlah agen pembangunan masyarakat semata. Perusahaan adalah entitas yang mencari keuntungan ekonomi, namun dalam usahanya tidak diperkenankan merusak lingkungan dan tatanan sosial ekonomi masyarakat. Perusahaan juga harus melindungi lingkungan dan sedapat mungkin memaksimumkan keuntungan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Karenanya, partisipasi masyarakat luas serta pihak-pihak lain yang kompeten dan memiliki niat baik menjadi sangat penting.

Mengingat hal di atas, berbagai indikator partisipasi dapat dipergunakan, yaitu Program direncanakan secara partisipatoris dengan memperhitungkan keragaman kelompok-kelompok masyarakat; Program tersebut merupakan komplemen dan suplemen dari kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak-pihak lain.

Kegiatan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat dan pihak lain yang memiliki kompetensi yang tepat. Pelaksanaan pemantauan kegiatan dilakukan bersama-sama dengan komponen masyarakat dan pemangku kepentingan lain. Serta dilakukannya evaluasi keberhasilan kegiatan bersama masyarakat dengan umpan balik bagi kegiatan mendatang Seluruh indikator di atas merupakan indikator masukan dan proses, sementara penilaian kinerja merupakan puncak upaya untuk mengetahui apakah perusahaan diterima oleh seluruh pemangku kepentingannya. Dalam hal ini, haruslah dikemukakan dimensi-dimensi keberhasilan dari berbagai sudut pandang, utamanya dari perusahaan sendiri, masyarakat, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain yang terlibat langsung dalam pengelolaannya.

Program yang memuaskan seluruh pihak merupakan cerminan keberhasilan tertinggi sehingga dapat diyakini bahwa keberadaan dan operasi perusahaan tersebut akan terus mendapatkan dukungan masyarakat dan pihak terkait lainnya.

Catatan kaki

1. *Chairil N. Siregar, Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi CSR Pada Masyarakat Indonesia*
2. *Dikutip dari Prof. Drs. B Tamam Achda, anggota komisi VII DPR-RI, Konteks Sosiologis Perkembangan CSR dan Implementasinya.*
3. *Dikutip dari Jean H. Marten, Corporate Social Responsibility Perusahaan Multinasional Kepada Masyarakat Sekitar : Studi Kasus, Jurnal Usahawan Nomer 03 Tahun XXXVI Maret 2007, Bagian CSR, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.*
4. *Dikutip dari A.B. Susanto, Corporate Social Responsibility, The Jakarta Consulting Group, 2007.*
5. *Dikutip dari Ari Margiono, Menuju Corporate social Leadership, Suara Pembaharuan, 11 Mei 2006.*
6. *Dikutip dari Ari Margiono, Menuju Corporate Sosial Ledership, Suara Pembaharuan, 11 Mei 2006.*
7. *Dikutip dari Ari Margiono, Menuju Corporate Sosial Ledership, Suara Pembaharuan, 11 Mei 2006..*
8. *Dikutip dari AB Susanto, 2007, A Strategic Management Approach, CSR, The Jakarta Consulting Group, 2007, Jakarta.*
9. *Dikutip dari A.B. Susanto, 1997, Budaya Perusahaan, PT Elex Media Komputindo, 1997, Jakarta.*
10. *Dikutip dari A.B. Susanto, 1997, Budaya Perusahaan, PT Elex Media Komputindo, 1997, Jakarta.*
11. *Dikutip dari A.B. Susanto, 1997, Budaya Perusahaan, PT Elex Media Komputindo, 1997, Jakarta.*
12. *Dikutip dari Ari Margiono, Menuju Corporate social Leadership, Suara Pembaharuan, 11 Mei 2006.*
13. *Dikutip dari Ari Margiono, Menuju Corporate social Leadership, Suara Pembaharuan, 11 Mei 2006.*
14. *Dikutip dari Ari Margiono, Menuju Corporate social Leadership, Suara Pembaharuan, 11 Mei 2006.*

Daftar Pustaka

- AB Susanto, 2007. A Strategic Management Approach. CSR. The Jakarta Consulting Group. Jakarta
- AB Susanto, 1997. Budaya Perusahaan. Jakarta. PT Elex Media Komputindo.
- AB Susanto, 2007. Corporate Social Responsibility. The Jakarta Consulting Group. Jakarta
- Elkington, J. 1997. Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business. Thompson. London.
- Margiono, Ari. Menuju Corporate Sosial Ledership. Suara Pembaharuan. 11 Mei 2006.
- Marten H. Jean, dkk. Corporate Social Responsibility. Perusahaan Multinasional Kepada Masyarakat Sekitar: Studi Kasus. Jurnal Usahawan Nomer 03 Tahun XXXVI Maret 2007. Bagian CSR. Universitas Kristen Satya Wacana. Slalatiga.
- Philip Kotler, 2007. Doing the Most Good for Your Company and Your Cause. New York. Thomas Dunne Books.

Penulis : HS Bayu Anggoro, ST

Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan,
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Public Service di Inggris Raya

Oleh: Ahmad Amiruddin

Selama tinggal dan belajar setahun di UK, saya mencatat beberapa hal menarik terkait dengan pelayanan umum yang diberikan kepada para warga Edinburgh, baik dia sebagai orang asing maupun sebagai penduduk UK atau Scotland. Saya menangkap kesan bahwa sistem pelayanan di Edinburgh terpercaya dan reliable, tidak harus cepat, tapi mereka bekerja dengan efisien, terencana dan taat asas. Berikut adalah beberapa pengalaman saya:

Transportasi Umum

Transportasi umum di Edinburgh adalah bis, tram dan kereta api. Bis dalam kota menggunakan Lothian Bus yang menghubungkan hampir semua titik di Edinburgh. Tak banyak perumahan yang tak terjangkau oleh Bis ini. Lothian Bus mengoperasikan 50 rute di sekitar kota Edinburgh. Jadwal bis terpublikasi dengan baik dan terintegrasi dengan beberapa aplikasi berbasis android maupun iOS. Jadwal bis juga terintegrasi dengan Google map yang memberikan petunjuk nomor bis, jalur dan jadwal kedatangan, cukup dengan menginput titik keberangkatan dan tujuan.

Di halte-halte disediakan juga jadwal keberangkatan dan jadwal tiba bis. Rentang waktu kedatangan bis tergantung jurusan dan kepadatan jalur tersebut. Umumnya jadwal kedatangan bis dalam rentang 10 s.d 15 menit. Secara umum jarang terjadi keterlambatan. Sepanjang pengalaman saya selama setahun, tidak lebih dari 3 kali saya mendapatkan bis yang terlambat 10 menit dari jadwal yang tertera. Bis menyediakan 1 tempat untuk stroller untuk bayi dan 1 space untuk pengguna kursi roda. Tinggi bis bisa diturunkan ketika ada penyandang disabilitas yang harus turun. Hal ini menjadikan bis sangat ramah bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus. Bis ini juga dilengkapi dengan CCTV dan perekam suara yang untuk memberi rasa aman bagi penumpang maupun supir bisnya.

Ongkos bis sekali naik disekitaran kota Edinburgh adalah £1.5 (£1 = ± Rp. 19.700) untuk tiket sehari adalah £3.5. Bagi pelajar diberikan diskon untuk berlangganan bis £40 selama sebulan dengan menggunakan Rida Card. Bagi para pensiunan di Edinburgh mendapatkan fasilitas bis gratis dengan menggunakan Scottish Concession Card.

Kendaraan yang menghubungkan antar kota adalah bis dan kereta. Harga tiket bis bisa 80% lebih murah daripada menggunakan kereta. Stasiun-stasiun kereta terhubung dengan halte bis dan bandara-bandara besar. Jika bis masih memiliki toleransi waktu lebih kurang lima menit dari jadwal kedatangan dan keberangkatan, maka kereta berangkat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Terkadang kereta berhenti hanya 1 menit di stasiun untuk menyesuaikan waktu

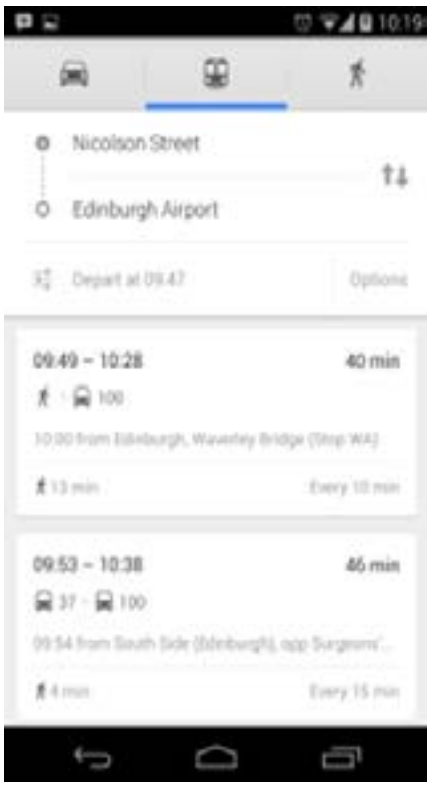

Google Maps Screenshot

keberangkatan dengan jadwal. Saya sendiri pernah ketinggalan kereta dari London ke Oxford, setelah hanya terlambat 3 menit dari jadwal. Akhirnya harus membayar dengan harga yang jauh lebih mahal. Awalnya saya hanya perlu membayar £17 untuk dua orang, namun karena terlambat harus membeli tiket baru dengan harga £58 untuk sekali jalan.

Untuk kereta juga tersedia kartu untuk mendapatkan diskon kereta. Salah satunya dengan menggunakan kartu 16-25 bagi yang berusia 16 s.d 25 tahun atau bagi pelajar meskipun berusia lebih dari 25 tahun dapat mengajukan pembuatan kartu dengan melampirkan keterangan sebagai mahasiswa dari universitas masing-masing. Kartu ini berlaku selama setahun dengan biaya £30. Dengan menggunakan kartu ini, bisa didapatkan diskon hingga 30% dari biaya normal.

Dengan jadwal dan ketepatan waktu bis, orang-orang bisa melakukan aktifitasnya secara terjadwal dan teratur yang bisa berandil dalam meningkatkan produktifitas.

Akses di Jalan Raya

Jalanan di Edinburgh ramah terhadap pejalan kaki dan yang menggunakan kursi roda. Setiap trotoar memiliki akses naik dan turun disetiap persimpangan jalan. Jika ada proyek perbaikan jalan yang menutup trotoar, maka trotoar pengganti yang berpagar dan bisa dilalui oleh kursi roda juga disediakan. Jika ada pembangunan yang berdekatan dengan jalan maka scaffolding yang dilalui pejalan kaki diberikan semacam busa sebagai peredam jika terjadi benturan antara pejalan kaki dengan tiang scaffolding tersebut.

Lalu lintas di Edinburgh tidak macet karena jumlah kendaraan yang tidak terlalu banyak dijalan. Untuk membayar parkir disediakan mesin pembayaran parkir off street. Tidak ada tukang parkir yang berdiri mengatur posisi parkir. Petugas parkir hanya berkeliling untuk memeriksa apakah seseorang telah membayar parkir atau tidak atau melanggar batas garis tidak boleh parkir. Tidak hanya denda tilang yang diberikan, mobil pengerek juga disediakan jika melanggar batas parkir dalam waktu yang lama.

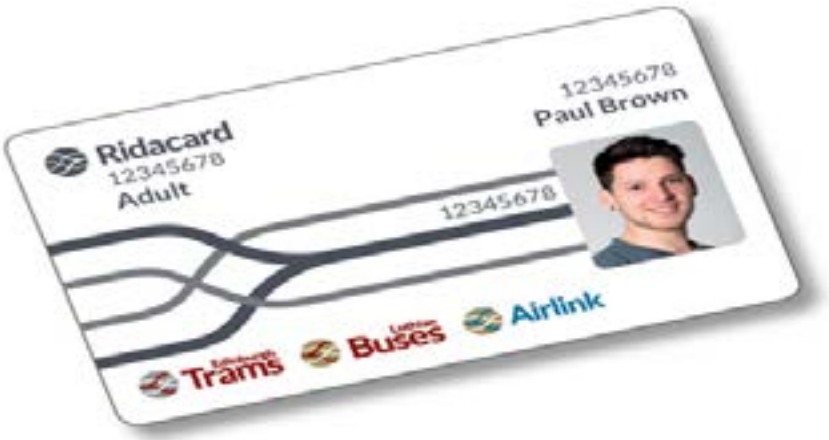

Rida Card (lothianbuses.com)

Listrik, Gas dan Air

Konsumen berlangganan listrik di Inggris Raya melalui retailer dengan sistem open market. Konsumen bisa mengajukan perpindahan retailer secara bebas. Tercatat 30% pelanggan berpindah retailer setiap tahunnya. Selama tinggal disana, belum pernah saya mengalami mati lampu. Sistem pembayaran yang digunakan adalah single tarif.

Perusahaan retailer untuk gas dan listrik di tempat saya sama. Di beberapa flat yang lain tidak menggunakan gas sama sekali namun menggunakan listrik. Harga listrik terdiri atas dua komponen yaitu . Secara rata-rata dalam sebulan kami menghabiskan Pencatatan meter dilaksanakan setiap 6 bulan sekali untuk menyamakan antara tagihan dengan pembacaan yang sebenarnya. Konsumen juga dapat memperbaiki bacaan meter untuk tagihannya melalui website yang tersedia. Nilai pembacaan ini akan diverifikasi oleh pihak utility dengan pengecekan ke lapangan. Listrik dan gas ditagih setiap 3 bulan.

Harga perkWh listrik yang ditagihkan adalah 12.82p atau £0.1282 ditambah dengan Discounted standing charge 24.53p perhari. Secara rata-rata, kami menggunakan listrik sekitar 540kWh perbulannya. Untuk air tidak menggunakan meter, namun harus membayar pajak air setiap tahunnya yang besarnya adalah £147.91 pertahun.

Taman dan Tempat Bermain Anak-anak

Kota Edinburgh dikelilingi banyak taman yang luas, asri dan Indah. Diantara taman kota yang besar adalah Royal Botanical Garden, Princess Street Garden dan Holyrood Park dan Meadowbank. Di tempat-tempat ini juga tersedia lokasi permainan bagi anak-anak yang digratiskan. Arena permainan ini didesain agar aman bagi anak-anak karena dilengkapi dengan pengaman dengan memasang karet tebal sebagai lantai lentur untuk mencegah cedera pada anak ketika terjatuh dari permainannya. Arena bermain ini tidak terlalu dipadati oleh anak-anak karena banyaknya pilihan taman dan permainan yang tersedia di seputaran kota.

Flower Clock di Princess Street

Sementara untuk taman digunakan oleh warga untuk duduk santai menikmati udara luar dan berjemur jika matahari bersinar cerah. Royal Botanical Garden di semacam kebun raya yang berisi koleksi tanaman-tanaman khas sub tropik maupun tropik. Tanaman dari daerah tropik ditempatkan pada rumah kaca untuk mendapatkan suhu dan kelembaban yang sesuai.

Kesehatan

Fasilitas kesehatan diberikan secara gratis bagi para pelajar di Inggris Raya melalui asuransi National Health Service (NHS). Asuransi ini diberikan juga untuk keluarga inti para pelajar yang memiliki visa student dependant. Tak banyak persyaratan yang harus disediakan untuk mendaftar. Namun, biasanya untuk mendaftar harus membuat janji terlebih dahulu untuk mengambil dan mengembalikan formulir yang harus diisi. Persyaratannya adalah melampirkan paspor,visa, surat keterangan tempat tinggal dan surat keterangan study dari University. Pendaftaran dilakukan di praktek dokter yang terdekat dengan tempat tinggal.

Di Klinik ini, tak mudah untuk menemui dokter. Dokter hanya bisa ditemui jika benar-benar emergency atau tak bisa menunggu. Saya pernah terkena flu dan batuk yang agak berat. Karena sudah berlangsung 3 hari dan terasa batuknya semakin menyiksa, saya ke klinik untuk membuat appointment dengan dokternya. Saya pikirnya paling lambat besoknya akan dijadwalkan bertemu dengan dokternya, namun ternyata saya dijadwalkan dua minggu baru bisa bertemu, karena hanya itu jadwal dokternya yang kosong. Akhirnya setelah dua minggu batuk dan flu saya sudah sembuh dengan sendirinya dan sayapun membatalkan appointment ke dokter.

Pengalaman teman yang lain, biasanya mereka hanya bisa ditemui perawat jika memang harus diperiksa dihari yang bersamaan. Dokter sangat sulit ditemui dan hanya hadir jika diperlukan. Teman yang mengalami persalinan di Edinburgh, dalam proses

kehamilannya hanya diperiksa oleh Bidan dan tak pernah ketemu dokter hingga persalinannya.

Saya juga mendaftarkan anak ke klinik tempat saya mendaftar. Setelah mendaftar, beberapa minggu kemudian perawat dari klinik akan mendatangi rumah untuk melakukan wawancara mengenai perkembangan anak dan riwayat kesehatannya. Setelah itu, beberapa kali ada undangan dari klinik untuk dilakukan vaksin sesuai dengan umur anak. Pernah pula ada undangan untuk dilakukan assesment terhadap perkembangan anak terkait kemampuan motorik dan kemampuan verbal anak sesuai dengan usianya. Semua layanan diatas gratis.

Dari pengalaman menggunakan fasilitas umum dan layanan umum beberapa hal yang dapat dipelajari dari kultur pelayanan di UK adalah:

1. Efisiensi

Pelayanan di UK diselenggarakan dengan cara yang efisien dan efektif. Sebagai contoh, pelayanan di Bank hanya dibuka 3 loket sebagai kasir sekaligus customer service. Untuk aplikasi rubah data, kita tidak harus mengisi dan menandatangani formulir, cukup datang ke bank dan akan langsung diganti oleh pihak bank dengan cukup menggunakan kartu debit. Layanan ini memberi efisiensi dan kecepatan, tak banyak rantai administrasi yang harus dilakukan.

2. Tepat Waktu

Pelayanan dilakukan dengan tenggat waktu yang jelas dan terstruktur. Jadwal kereta dan bis dipatuhi dan terpercaya. Waktu keberangkatan dan ketibaan bisa diperkirakan berdasarkan jadwal yang telah dipublikasi.

3. Tak Selalu Cepat

Berbeda dengan pemikiran saya selama ini bahwa semua pelayanan di luar negeri bisa cepat sesuai dengan keinginan kita, ternyata tidak selalu demikian. Tingkat urgensi dari layanan menjadikannya kecepatan bisa berbeda. Seperti pengalaman saya yang ingin menemui dokter akan tetapi dijadwalkan lebih lama dari yang saya inginkan, akan tetapi karena tidak terlalu urgen secara hitungan kesehatan, maka jadwal bertemu dijadwalkan lebih lama dari yang saya inginkan.

4. Tak banyak basa basi

Meskipun orang Inggris termasuk sangat ramah, namun tak banyak basa basi dalam melayani. Mereka memang senang tersenyum, namun tak berlebihan ataupun menampakkan tindakan yang dibuat buat hanya untuk berbasa basi dengan kami. Kadangkala saya juga berpikir, mereka agak sedikit kaku di pos pendaftaran, menegur kalo kita memotong penjelasannya, dan membiarkan mereka menjelaskan jawabannya yang belum selesai.

5. Semua diperlakukan sama

Saya mendapati bahwa pelayanan yang diberikan kepada orang dengan tidak melihat warna kulit, ras, dan agama. Semua diperlukan dengan sama dan setaraf. Prioritas hanya diberikan kepada orang penyandang disabilitas, orang yang sudah lanjut usia dan ibu hamil.

Standard yang ditampilkan oleh layanan umum di Inggris memang tidak harus sepenuhnya di contoh di Indonesia tapi ada banyak hal yang bisa dipelajari dan dijadikan acuan seperti keteraturan, efisiensi dan ketepatan waktu pelayanan di Inggris.

TINJAUAN PROGRAM LISTRIK PERDESAAN PROVINSI MALUKU UTARA

Oleh: Hari Dwi Wijayanto

KEBIJAKAN UMUM PENGEMBANGAN LISTRIK PERDESAAN

Kebijakan umum pengembangan ketenagalistrikan dalam jangka pendek dimana kapasitas pembangkit PLN masih terbatas karena proyek-proyek pembangkit belum sepenuhnya selesai, PLN telah dan akan memenuhi permintaan tenaga listrik dengan menyewa pembangkit sebagai solusi interim. Pada tahun-tahun berikutnya dimana penambahan kapasitas pembangkit dan transmisi diharapkan telah selesai dan reserve margin telah mencukupi, maka penjualan akan dipacu untuk mengoptimalkan pemanfaatan pembangkit listrik.

Hal ini dilakukan untuk mempercepat peningkatan rasio elektrifikasi secara signifikan dengan menyambung konsumen residensial baru dalam jumlah yang cukup tinggi setiap tahun, dan melayani semua daftar tunggu yang ada.

Masalah penyediaan tenaga listrik yang mendesak adalah upaya memenuhi listrik pada daerah-daerah yang kekurangan pasokan listrik dan mengganti pembangkit berbahan bakar minyak dengan bahan bakar non-minyak serta melistriki daerah yang belum mendapatkan pasokan listrik.

Tindakan yang telah dilakukan di wilayah operasi Indonesia Barat dan Timur meliputi sewa pembangkit, pembelian energi listrik dari IPP skala kecil, bermitra/kerjasama operasi pembangkit dengan Pemda setempat, pembelian excess power, percepatan pembangunan PLTU batubara PerPres 71/2006, membangun saluran transmisi, mengamankan kontinuitas pasokan energi primer dan memasang beberapa PLTS secara terbatas.

Sedangkan tindakan jangka pendek di Jawa – Bali berupa percepatan pengadaan trafo daya 150/20 kV dan trafo interbus 500/150 kV, menambah kapasitas pembangkit di Bali, mempercepat pembangunan kabel laut Jawa-Bali 150 kV sirkit 3 dan 4, dan memasang kapasitor shunt di sistem Jakarta untuk perbaikan tegangan.

Fokus pengembangan dan investasi sistem distribusi secara umum diarahkan pada perbaikan tegangan pelayanan, penurunan susut teknis jaringan dan rehabilitasi jaringan yang tua. Kegiatan berikutnya adalah investasi perluasan jaringan untuk melayani pertumbuhan dan perbaikan sarana pelayanan.

Pengembangan kapasitas pembangkit direncanakan untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan listrik dan margin cadangan (reserve margin) tertentu dan sedapat mungkin direncanakan secara optimal dengan prinsip biaya terendah (least cost). Pengembangan pembangkit juga mengutamakan pemanfaatan sumber energi setempat, terutama energi terbarukan seperti panas bumi dan tenaga air.

Beberapa proyek pembangkit telah dinyatakan akan dikerjakan sebagai proyek PLN atau proyek listrik swasta (IPP), sedangkan beberapa proyek lagi masih belum ditetapkan sebagai proyek PLN atau IPP. Hal ini dimaksudkan agar PLN nanti, atas persetujuan Pemerintah, akan memutuskan apakah suatu proyek diimplementasikan sebagai proyek PLN atau IPP.

Pengembangan sistem transmisi direncanakan untuk memperoleh keseimbangan antara kapasitas pembangkitan dan kebutuhan daya listrik secara efi sien dengan memenuhi kriteria keandalan dan kualitas tertentu. Pada sistem kelistrikan yang sudah besar seperti Sumatera dan Jawa, direncanakan pula satu sistem transmisi yang menjadi tulang punggung sistem kelistrikan (backbone) berupa saluran transmisi tegangan ekstra tinggi.

Pembangunan listrik perdesaan merupakan penugasan Pemerintah kepada PLN untuk melistriki masyarakat perdesaan yang pendanaannya diperoleh dari APBN, dan diutamakan pada provinsi dengan rasio elektrifikasi yang masih rendah. Kebijakan yang diambil oleh Direktorat Jendral Ketenagalistrikan (DJK) dan PLN dalam pembangunan listrik desa untuk menunjang rasio elektrifikasi 81, 51% di tahun 2014 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kementerian ESDM 2010-2014 adalah:

- Pembangunan jalur keluar jaringan distribusi untuk mendukung evakuasi daya dari proyek GI Baru atau Extension Trafo GI yang pendanaannya diperoleh dari APBN.
- Pembangunan jalur keluar jaringan distribusi untuk mendukung evakuasi daya dari proyek PLTU skala kecil tersebar dan pembangkit mikro / mini tenaga air yang pendanaannya diperoleh dari APBN.
- Pembangunan jalur keluar jaringan distribusi untuk mendukung evakuasi daya dari proyek PLTU skala kecil tersebar yang pendanaannya dari APLN, dengan catatan jalur keluar jaringan distribusi tersebut belum disediakan dari APLN.
- Melistriki desa baru maupun desa lama yang sebagian dari dusun tersebut belum berlistrik, daerah terpencil dan daerah perbatasan.
- Dimungkinkan pemasangan load break switch untuk menunjang perbaikan keandalan jaringan tegangan menengah dan tiang 14 meter serta konduktor 240 mm² untuk mengantisipasi kebutuhan pengembangan sistem.
- Dimungkinkan pengadaan hybrid PLTS dan hybrid PLTB yang sistemnya terhubung dengan grid PLN.
- Melaksanakan program Listrik Murah dan Hemat dengan target masyarakat nelayan, daerah tertinggal dan akselerasi rasio elektrifikasi.

KONDISI KELISTRIKAN SAAT INI

Penjualan tenaga listrik pada lima tahun terakhir tumbuh rata-rata 8,5% per Tahun, sedangkan pertumbuhan rata-rata penjualan listrik di Jawa Bali (6,3% per tahun) relatif lebih rendah daripada pertumbuhan rata-rata di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara.

Konsumsi tenaga listrik pada tahun 2013 mencapai sekitar 188 188 TWh, dimana masih didominasi oleh sektor rumah tangga sebesar 41%, sektor industri sebesar 34%, sektor komersial sebesar 19%, dan sektor publik sebesar 6%.

Rasio elektrifikasi didefinisikan sebagai jumlah rumah tangga yang sudah berlistrik dibagi dengan jumlah rumah tangga yang ada. Perkembangan rasio elektrifikasi secara nasional dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, yaitu dari 76,56% pada tahun 2012 menjadi 80,51% pada tahun 2013.

Untuk rasio elektrifikasi provinsi Maluku Utara pada tahun 2012 sebesar 74,12%, sedangkan pada tahun 2013 meningkat menjadi 87,67%. Pada periode tersebut kenaikan rasio elektrifikasi pada wilayah-wilayah Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan pulau lainnya diperlihatkan pada gambar 1 di bawah ini.

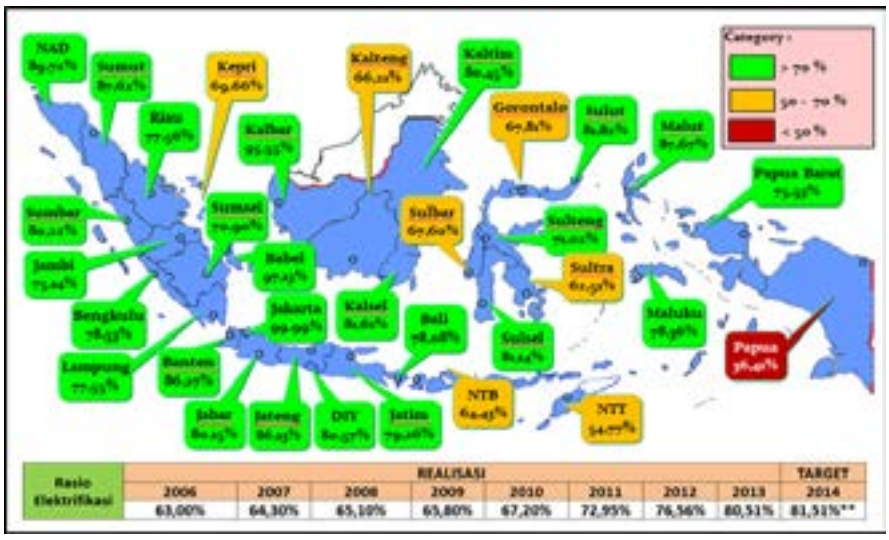

Gambar 1. Peta Rasio Elektrifikasi Tahun 2013

Sistem kelistrikan di Provinsi Maluku Utara terdiri dari 6 sistem kelistrikan dengan beban di atas 1 MW yaitu Sistem Ternate - Soa - Siu (Tidore), Tobelo - Malifut, Jailolo -Sofifi - Payahe, Bacan, Sanana dan Daruba. Selain itu juga terdapat 19 unit pusat pembangkit skala yang lebih kecil di lokasi tersebar.

Beban puncak gabungan (non coincident) sistem-sistem kelistrikan di Provinsi Maluku Utara saat ini sekitar 57 MW, dipasok oleh PLTD tersebar dan PLTS yang terhubung langsung ke sistem distribusi 20 kV.

Dari gambar diatas, terlihat ada lima sistem yang surplus dengan tiga sistem diantaranya terancam mengalami defisit yaitu sistem Jailolo, Daruba, dan sistem Bacan. Sedangkan sistem Tobelo mengalami defisit, dimana beban puncak mencapai 7,50 MW dengan daya mampu 7,30 MW sehingga berakibat sistem mengalami defisit 0,20 MW.

Ternate merupakan kota terbesar di Provinsi Maluku Utara dan mempunyai populasi penduduk terbesar di Provinsi ini. Pertumbuhan ekonomi Provinsi ini cukup tinggi dan dalam lima tahun terakhir mencapai rata-rata di atas 7% per-tahun. Kekayaan alamnya juga melimpah berupa tambang nikel dan emas yang banyak tersedia di Pulau Halmahera.

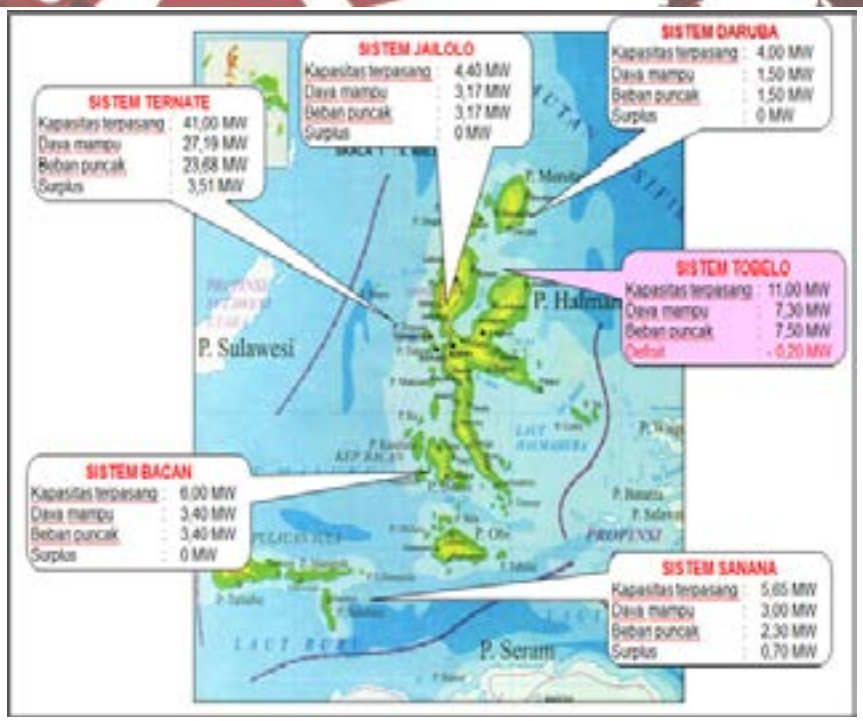

Gambar 2. Kondisi Sistem Kelistrikan Maluku Utara Agustus 2014

Sesuai rencana MP3EI, kawasan ini akan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur dengan program utama adalah pengembangan industri pengolahan tambang yaitu ferro nikel dan industri hilirnya untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi. Selain itu, di Morotai juga akan dikembangkan kawasan industri pengolahan. Kondisi ini akan dapat mendorong ekonomi di Provinsi ini tumbuh lebih cepat dan pada akhirnya kebutuhan listrik juga akan meningkatkan lebih tinggi.

No	Wilayah	Sistem	Terpasang (MW)	Unit Terbesar (MW)	DMP (MW)	BP (MW)	Cad (MW)	Status (kali)			Tanggal BP
								Normal	Siaga	Defisit	
1	M2U	Bacan/Halmahera Selatan	6,00	0,70	3,40	3,40	0,00	0	27	4	26/08/2014
2	M2U	Daruba/Morotai	4,00	0,40	1,50	1,50	0,00	0	17	14	02/08/2014
3	M2U	Jailolo/Halmahera Barat	4,40	0,75	3,17	3,17	0,00	0	7	24	30/08/2014
4	M2U	Sanana	5,65	0,50	3,00	2,30	0,70	31	0	0	17/08/2014
5	M2U	Ternate	41,00	3,50	27,19	23,68	3,51	7	24	0	14/08/2014
6	M2U	Tobelo/Halmahera Utara	11,00	1,40	7,30	7,50	-0,20	3	4	24	14/08/2014

Gambar 3. Kondisi Kelistrikan Maluku Utara Saat Beban Puncak Agustus 2014

PENGEMBANGAN LISTRIK PERDESAAN

Untuk saat ini pembangunan listrik desa di seluruh Indonesia dilaksanakan oleh 31 Satuan Kerja Listrik Desa/Satker Lisdes, dimana untuk 30 Satker Lisdes tersebut berada pada masing-masing provinsi, kecuali untuk 1 Satker Lisdes merupakan gabungan dua provinsi yaitu Jateng dan DIY.
Pengembangan distribusi di Provinsi Maluku Utara dimaksudkan untuk memenuhi proyeksi tambahan pelanggan baru sekitar 187 ribu sambungan sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2014 akan disambung rata-rata 18.756 pelanggan setiap tahun. Selain itu direncanakan pula jaringan 20 kV untuk menghubungkan pulau-pulau yang memiliki potensi sumber energi terbarukan dan murah dengan pulau di dekatnya yang tidak tersedia energi murah. Namun demikian, interkoneksi ini tetap mempertimbangkan kelayakan teknis dan keekonomiannya serta hasil studi laut.
Tujuan pembangunan listrik desa itu sendiri adalah untuk :

- Mendorong peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan.
- Meningkatkan kualitas bidang pendidikan dan kesehatan.
- Mendorong produktivitas ekonomi, sosial dan budaya masyarakat pedesaan.
- Memudahkan dan mempercepat masyarakat pedesaan memperoleh informasi dari media elektronik serta media komunikasi lainnya.
- Meningkatkan keamanan dan ketertiban yang selanjutnya diharapkan juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pada tahun 2013, Satuan Kerja Listrik Perdesaan Maluku Utara ditargetkan membangun jaringan distribusi sepanjang 175 kms, dengan rincian untuk jaringan tegangan menengah sepanjang 125 kms dan jaringan tegangan rendah sepanjang 50 kms. Untuk pembangunan gardu distribusi sebesar 2.460 kVA, sedangkan listrik gratis ditargetkan sebanyak 2.528 RTS (Rumah Tangga Sasaran). Realisasi pekerjaan Listrik Perdesaan Maluku Utara pada tahun 2013 yaitu pekerjaan jaringan tegangan rendah (JTR) sepanjang 76,52 kms dan jaringan tegangan menengah (JTM) sepanjang 153,92 kms, sehingga total jaringan distribusi yang diselesaikan sepanjang 230,44 kms (131%). Untuk pekerjaan gardu distribusi berhasil diselesaikan sebanyak 51 unit atau 3.160 kVA (128%). Sedangkan pekerjaan listrik gratis berhasil diselesaikan sebanyak 2.809 RTS sehingga persentase mencapai 111%.
Dari grafik diatas dapat terlihat bahwa progress untuk pekerjaan jaringan distribusi dan juga gardu distribusi berjalan dengan baik bahkan mampu melebihi dari target yang telah ditetapkan. Demikian pula untuk pekerjaan listrik gratis berjalan dengan baik dan mampu mencapai target yang ditetapkan.

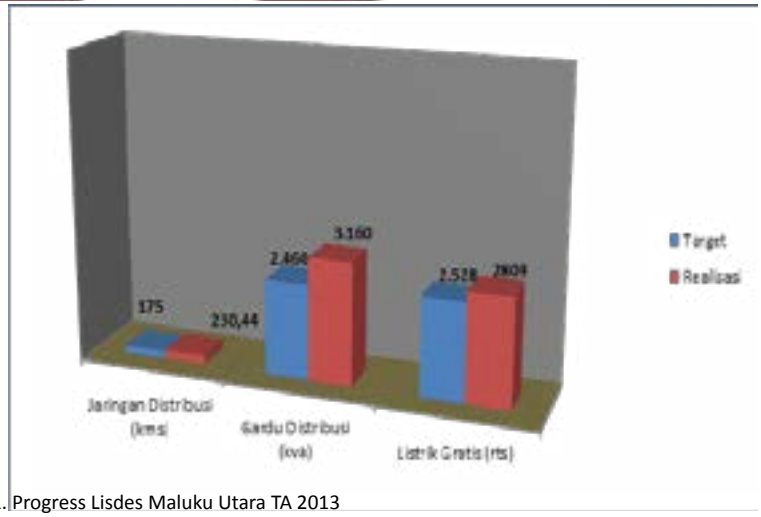

Grafik 1. Progress Lisdes Maluku Utara TA 2013

Gambar 4. Foto Pembangunan Jaringan dan Gardu Distribusi

Gambar 5. Foto Pembangunan Listrik Gratis

Berikut dibawah ini detail data lokasi desa untuk pembangunan jaringan dan gardu distribusi pada tahun 2013. Total desa yang mendapat program jaringan dan gardu distribusi sebanyak 83 desa yang tersebar di 7 (tujuh) kabupaten.

N0	Kab/Kota	J u m l a h Desa
1.	Halmahera Timur	4
2.	Halmahera Selatan	28
3.	Halmahera Utara	18
4.	Halmahera Tengah	5
5.	Kepulauan Morotai	12
6.	Kepulauan Sula	14
7.	Kepulauan Sula	2
TOTAL		83

Tabel 1. Data Lokasi Desa Jaringan dan Gardu Distribusi Tahun 2013

N0	Kab/Kota	Keterangan
1.	Tidore Kep.	Tersebar di 3 kecamatan
2.	Halmahera Selatan	Tersebar di 3 kecamatan
3.	Halmahera Utara	Tersebar di 2 kecamatan
4.	Halmahera Tengah	Tersebar di 3 kecamatan
5.	Halmahera Barat	Tersebar di 6 kecamatan
6.	Kepulauan Morotai	Tersebar di kec. Morotai Timur

Tabel 2. Data Lokasi Desa Listrik Gratis Tahun 2013

RENCANA TAHUN 2014

Untuk tahun 2014, provinsi Maluku Utara ditargetkan membangun jaringan tegangan rendah (JTR) sebesar 40,75 kms dan untuk pekerjaan jaringan tegangan menengah (JTM) sebesar 117 kms dengan total 157,75 kms. Untuk gardu distribusi ditargetkan sebesar 2.760 kVA. Sedangkan untuk pekerjaan listrik murah hemat yang berganti menjadi listrik gratis, ditargetkan mampu mencapai 4.366 RTS.

KESIMPULAN

Program listrik perdesaan di provinsi Maluku Utara sudah berjalan dengan baik di tahun 2013. Hal ini terlihat dari capaian yang sesuai dengan target, namun untuk kedepannya ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, antara lain yaitu :

1. Potensi pesatnya pertumbuhan kawasan industri antara lain di Ternate, morotai, dan pulau halmahera yang berbanding lurus dengan kebutuhan listrik sehingga perlu pembangunan pembangkit listrik dan juga jaringan transmisi.
2. Kemampuan pabrikan dalam menyediakan material distribusi utama (MDU) untuk pekerjaan Listrik Perdesaan yang berpotensi menyebabkan persediaan menjadi terbatas.
3. Lokasi listrik gratis yang harus disiapkan sebelumnya untuk mampu mencapai target di tahun berikutnya.